

Ansari Memorial Series

**KHILAFAH, HIJAZ DAN
NEGARA-BANGSA SAUDI-WAHABI**

Imran N. Hosein

MASJID DARUL QUR'AN, LONG ISLAND, NEW YORK

Hak cipta dimiliki penulis
Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1996 oleh
Masjid Darul Qur'an,
1514 East Third Avenue,
Bayshore, NY 11760
USA

Email: inhosein@hotmail.com

Web: <http://imranhosein.org>

Didedikasikan untuk saudaraku tersayang

Abid Siddiqui

Muslim Center New York

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bab 1 Diplomasi Inggris dan Serangan terhadap Khilafah

Bab 2 Kejatuhan Khilafah Utsmaniyah dan Kebangkitan
Negara Bangsa Saudi-Wahabi

Perang Dunia Pertama dan Pembubaran Khilafah
Utsmaniyah

Nasionalis Turki dan Khalifah

Tanggapan Universitas Al-Azhar terhadap Pembubaran
Khilafah

Bab 3 Konferensi Khilafah, Kairo. Mei 1926

Bab 4 Alternatif Saudi-Wahabi pengganti Khilafah. Kongres
Muslim Sedunia, Mekah. Juni-Juli 1926.

Bab 5 Dunia Islam Konservatif -- Usaha Membangkitkan
Khilafah: Kongres Islam Umum. Jerusalem, Juli 1931.

Kesimpulan

Catatan

KATA PENGANTAR

Ini adalah penerbitan buku ketiga dalam Seri Memorial Ansari, dipublikasikan untuk menghormati guru saya dan Sheikh dengan ingatan yang diberkahi, *Maulana* Dr. Muhammad Fadlur Rahman Ansari (1914-1974). Dua penerbitan sebelumnya berjudul: ‘Agama Ibrahim dan Negara Israel – Sebuah Pandangan Berdasarkan Al-Qur’an’ dan ‘Pentingnya Larangan Riba dalam Islam’.

Sebagian besar penelitian untuk menulis buku ini dilakukan pada tahun 1975-1979 di Perpustakaan PBB, *Palais des Nations*, Jenewa, ketika saya menjadi mahasiswa pasca-sarjana program studi Hubungan Internasional di *Graduate Institute of International Studies* (Institut Pasca-Sarjana Studi Internasional), Jenewa.

Kami mengalami, pada saat penulisan, keadaan yang memburuk dengan cepat di dunia Muslim saat ini, konflik berdarah menimpa umat muslim yang tidak bersalah dengan penderitaan yang tak terbayangkan di Bosnia, Kashmir, Al-Jazair, Palestina, Chechnya, dll. Kemarin ada lima puluh ribu wanita muslimah diperkosa di Bosnia, dan cerita horor baru-baru ini tentang anak lelaki yang dipaksa menggigit buah pelir ayahnya di Bosnia, dan Sheikh Muslim buta yang tidak bersalah, Omar Abdul Rahman, yang dihukum hidup di dalam penjara di AS (karena dia merupakan ancaman yang terlalu bahaya bagi rezim sekuler pro-barat yang menguasai Mesir), dan yang dipermalukan secara

seksual oleh penjaga penjara setiap ada pengunjung yang menemuinya di penjara.

Kini saya yakin sudah tiba waktunya karya tulis ini menjangkau umat muslim secara umum yang saat ini mungkin sudah cukup terbangkitkan untuk mencari tahu dengan serius penyebab melemahnya kita. Mereka mungkin, sebagai akibatnya, menganggap karya tulis ini dengan serius dan menolak protes yang diperkirakan datang dari ulama-ulama yang berkuasa dan pemerintah yang mereka dukung, di seluruh dunia muslim!

Saya berdoa semoga Allah menerima dan memberkahi usaha sederhana demi memperjuangkan Kebenaran ini. Semoga ini berpengaruh kuat bagi umat muslim sehingga mata mereka akan terbuka terhadap fakta bahwa rezim Saudi-Wahabi yang kini menguasai Haramain dan Hijaz memainkan peran aktif dalam kehancuran Khilafah Islam dan sejak saat itu telah menjadi halangan restorasi kekuatan Umat Islam. Amin!

I.N.H

Masjid Darul Qur'an

November 1996. Jumadil Akhir 1417.

KHILAFAH, HIJAZ DAN NEGARA BANGSA SAUDI-WAHABI

Pendahuluan

Satu inti karakteristik agama Islam adalah tuntutananya bahwa jika suatu kaum mengakui Allah Maha Tinggi sebagai ‘pemilik kedaulatan’ (Al-Malik) maka mereka harus memastikan Negara dan semua lembaganya tunduk pada supremasi kekuasaan dan hukum Allah. Jika Negara, bukannya Allah, diakui sebagai pemilik kedaulatan, dan itu adalah inti sekularisme, Islam menyatakan itu adalah Syirik dan itulah dosa terbesar.

Di seluruh dunia saat ini, Negara sekular modern secara universal diakui kedaulatannya. Kekuasaannya diakui sebagai yang tertinggi, dan begitu pula hukumnya. Maka di seluruh dunia saat ini, manusia dipeluk oleh politik Syirik universal. Inilah, sesungguhnya, salah satu tanda besar bahwa kita sekarang hidup pada zaman Dajjal al-Masih palsu atau Anti-Kristus, yang menipu manusia agar menyembah selain Allah Maha Tinggi. Dia, Dajjal, adalah dalang di balik tatanan dunia saat ini seperti yang dinyatakan Hadits 999 dari 1000 akan memasuki api neraka. Tapi bahkan umat muslim tampaknya tidak menyadari hal ini.

Karena umat muslim mengakui Allah berdaulat, mereka tidak pernah mengakui Konstitusi, Parlemen, Mahkamah Agung, Pemerintah dll. berdaulat. Kedaulatan Allah berarti supremasi agama Islam dan khususnya hukum suci atau Syariah. Institusi

Khilafah melambangkan supremasi Islam atas Negara dan atas kehidupan publik. Khalifah, yang dengan nama lain dikenal sebagai Amir atau Imam, adalah kepala Jama'ah atau masyarakat Muslim. Mereka berjanji setia kepadanya melalui institusi bai'at. Wilayah di mana Jama'ah berada dinamakan Darul Islam. Dinamakan demikian karena Amir mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk menegakkan hukum suci Allah di wilayah itu.

Peradaban Kristen-Eropa juga didirikan berdasarkan pengakuan kedaulatan Tuhan. Di peradaban itu, Gereja yang diakui sebagai wakil Tuhan di bumi, dan dengan demikian Negara tunduk kepada Gereja.

Tapi Eropa mengalami konflik antara agama melawan Negara dengan hasil kalahnya Gereja. Akibatnya Eropa mengalami perubahan revolusioner pada dasar-dasar peradabannya sehingga Negara dan politik disekularisasi. Bab terakhir konflik tersebut, yang menentukan nasib agama di Eropa, dan mewujudkan peradaban yang pada intinya tidak bertuhan menjadi nyata, adalah Revolusi Amerika, Prancis, dan Bolshevik. Ruang agama direduksi hanya penyembahan individu dan kelompok, Paus dan Kristen-Eropa dilarang memasuki peran dalam kepemimpinan Negara. Tuhan tidak lagi diakui sebagai yang berdaulat (al-Akbar). Melainkan rakyatlah yang berdaulat, dan mereka memberikan kedaulatan itu kepada model Negara sekular baru. Negara kini adalah al-Akbar. Bagi Eropa itu adalah sekularisme. Bagi Islam, itulah Syirik, dosa terbesar!

Aneh sekali Kristen Non-Eropa tidak melakukan perjuangan besar melawan kerusakan model suci sebuah Negara yang

diciptakan Nabi Daud dan Sulaiman (keselamatan atas mereka berdua) ini.

Peradaban Eropa tidak bertuhan memulai perjuangan perang salibnya untuk mengubah seluruh dunia dan menatanya kembali dengan model Negara sekular dan Masyarakat tidak bertuhan Eropa baru. Belahan bumi lainnya dijajah atau kebebasan intinya dirampas. Maka dunia non-Eropa pun, pada akhirnya disekularisasi dan dengan cepat direduksi menjadi masyarakat tidak bertuhan. Ini termasuk dunia Islam. Sesungguhnya dunia Islam adalah target utama peradaban Eropa tidak bertuhan.

Proses reduksi dunia Islam menuju masyarakat tidak bertuhan dimulai dengan sekularisasi kehidupan publik. Kekaisaran Utsmaniyah dijadikan sebagai target. Ia harus dihancurkan. Tapi ia tidak bisa dihancurkan selama Khilafah tetap menjadi institusi kuat persatuan umat Muslim. Maka Khilafah pun harus dihancurkan.

Kehancuran Kekaisaran Utsmaniyah, yang berlaku efektif pada Perang Dunia Pertama, mengakibatkan munculnya Negara Turki sekular. Pemerintahnya adalah golongan nasionalis Turki sekular barat yang erat bekerja sama dengan gerakan Yahudi bawah tanah. Pertama-tama mereka mereduksi Khalifah sebagai lambang seperti Paus, kemudian membubarkannya. Tapi proses sekularisasi di dunia Islam ditentukan saat Hijaz, di bawah kekuasaan Abdul Aziz ibn Saud, juga bergabung dengan Mustafa Kamal (Ataturk) dalam penolakan supremasi Islam atas Negara. Jadi Arab, jantung tanah Islam, pun memeluk model Negara sekular. Kelahiran Negara Saudi Arabia bersamaan

dengan kehancuran Darul Islam yang didirikan Nabi Muhammad (keselamatan dan keberkahan Allah atasnya).

Selama Hijaz menjadi Darul Islam, setiap Muslim berhak memasuki wilayah itu, - dia tidak perlu visa. Tidak ada hal seperti kedaulatan Saudi. Tidak ada hal seperti kewarganegaraan Saudi. Hak memasuki Darul Islam adalah salah satu dari beberapa hak yang dimiliki muslim, seperti hak tinggal di Darul Islam, - mereka tidak perlu surat ijin menetap, hak mencari penghasilan di Darul Islam, mereka tidak perlu surat ijin bekerja dll. Lahirnya Negara Saudi Arabia mengakibatkan penolakan dan penghapusan semua hak umat muslim ini.

Hancurnya Khilafah dan munculnya Negara Saudi Arabia adalah peristiwa yang mengubah muka dunia Islam sehingga peradaban islam kembali pada tahap pra-Hijrah. Tidak ada tempat di dunia saat ini di mana Darul Islam berada.

Kami percaya, benar untuk menyatakan bahwa perbedaan dasar yang ada antara Islam sebelum dan setelah Hijrah adalah pendirian Darul Islam (Pemerintahan Publik Islam) oleh Nabi (s.a.w.) di Madina. Tapi dunia Islam seperti dunia non-Eropa lainnya, saat ini digabungkan dalam sistem organisasi politik sekular dan materialis, merupakan unit Negara-bangsa sekular modern. Sebagai akibatnya, Darul Islam tidak lagi ada saat ini, tidak ada bahkan di Mekah dan Madinah. Dengan alasan-alasan itulah kami menyimpulkan bahwa dunia Islam kembali, dalam keberadaan kolektifnya sebagai satu Umat, pada tahap Islam pra-Hijrah.

Peradaban Islam kini memasuki era berlalunya khilafah dalam sejarahnya. Dan, seperti Mekah empat belas abad lalu, begitu pula saat ini, - umat Muslim seluruh dunia tunduk pada Jahiliyah yang mendominasi dunia. Jahiliyah itu, tentunya, adalah peradaban barat sekular dan materialis modern pasca Kristen.

Mungkin, secara khusus menyebutkan zaman ini, saat Nabi Islam (s.a.w.) dilaporkan telah bersabda: “Barangsiapa mati tanpa melakukan (selama masa hidupnya) (institusi) Bai’at (sumpah setia masyarakat penentuan posisi pemimpin atas Umat Islam disahkan) tentunya mati dalam kematian jahiliyah (yakni kematian pada zaman jahiliyah pra-Hijrah)”.

Hadits Nabi (s.a.w.) ini dianggap sangat sahih dan penting sehingga digunakan Universitas Al-Azhar sebagai dasar untuk mengadakan Konferensi Internasional Khilafah Islam di Kairo yang akan menanggapi dengan tepat keputusan Dewan Nasional Turki, pada bulan Maret 1924, yang membubarkan Khilafah.

Konferensi itu sendiri, yang diadakan pada 1926, menghasilkan resolusi yang memasukkan pernyataan Nabi (s.a.w.) ini dan menegaskan pentingnya institusi Khilafah, dan dengan demikian, Pemerintah Publik Islam, untuk dunia Islam.

Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini jelas dan sederhana. Adalah berusaha mengulangi gerakan asli umat Islam dan, melakukan perjalanan **dari Mekah ke Madinah sekali lagi**. Dengan melakukan itu, umat Islam akan kembali mewujudkan pendirian Darul Islam (Pemerintahan Publik Islam). Jika Umat ini berhasil merestorasi supremasi Islam atas Negara di dunia Islam, wajib bagi umat Islam memperhatikan

sejarah jatuhnya Khilafah dan penggantinya, di jantung tanah Islam, dengan Negara-bangsa Saudi-Wahabi sekular.

Studi ini bahkan lebih penting secara strategis karena musuh yang menghancurkan Khilafah kini mengarahkan perhatian mereka pada Ibadah Haji. Ibadah Haji telah dilaksanakan tanpa gangguan sejak diamalkan oleh Nabi Ibrahim (a.s.) ribuan tahun lalu. Ibadah Haji terus dilanjutkan bahkan saat Arab memeluk agama berhala. Musuh-musuh Islam kini mempunyai satu tujuan jangka panjang tertinggi mereka, berhentinya Ibadah Haji.

Abu Said al-Khudri menyampaikan Hadits Nabi (s.a.w.) bahwa dia, Nabi, bersabda:

“Umat akan terus melaksanakan ibadah Haji dan Umrah ke Ka’bah bahkan setelah munculnya Yajuj dan Majuj.” Syuba menyampaikan, sebagai tambahan: Kiamat tidak akan terjadi hingga ibadah Haji ke Ka’bah ditinggalkan.”

(Bukhari)

Studi kami mengenai topik ini telah menuntun kami untuk menyimpulkan bahwa tujuan menghentikan ibadah Haji kini di dalam genggamannya musuh-musuh Islam. Semua yang dibutuhkan agar tujuan itu tercapai adalah penghancuran Masjid Al-Aqsa. Negara Yahudi Israel bisa melakukan itu kapan saja. Itu hanya masalah menentukan momen yang menguntungkan. Rezim Saudi saat ini dengan licik ditarik ke dalam posisi yang tidak bisa dibalikkan melawan Negara Yahudi. Kehancuran Masjid Al-Aqsa akan mengakibatkan perlawanan lebih besar bangsa Saudi. Mereka tidak akan mampu mengendalikan amarah yang akan diungkapkan umat Muslim saat pelaksanaan ibadah Haji.

Tapi jika mereka tidak mampu mengendalikan ibadah Haji maka oposisi internal di dalam Saudi Arabia akan menggunakan ibadah haji untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Ini adalah skenario yang sepertinya akan menuntun Saudi menghentikan ibadah Haji demi mempertahankan kekuasaan mereka.

Jika dunia Islam kehilangan ibadah Haji, setelah kehilangan Khilafah, itu akan menjadi langkah besar kemunduran ke tahap Jahiliyah pra-Hijrah Mekah. Bahaya keselamatan kita akan menjadi sesulit saat pra-Hijrah Mekah. Hanya Iman sekuat mungkin yang akan bertahan melalui ujian sulit itu! Apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yang harus diambil dalam melancarkan strategi balasan adalah mempelajari dan dengan kritis mengevaluasi sejarah periode saat Khilafah lenyap. Inilah usaha yang dilakukan dalam buku ini.

BAB SATU

DIPLOMASI INGGRIS DAN SERANGAN TERHADAP KHILAFAH

Allah, Maha Kuasa, menyampaikan agama Islam yang disempurnakan melalui Nabi Muhammad (s.a.w.) agar bisa mendirikan supremasinya atas semua saingan. Ini memerlukan terlebih dahulu tunduknya Umat kepada supremasi Islam baik di kehidupan pribadi muslim maupun publik.

Kedudukan Khilafah menjadi simbol tertinggi Islam sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan publik. Tanpa Khilafah, dunia Islam tidak akan memiliki kekuatan. Ada hubungan permanen antara Khilafah dengan kekuasaan atas Haramain, yakni wilayah sakral di Mekah dan Madinah. Siapa pun yang berhasil memutus hubungan itu akan menghancurkan institusi Khilafah dan, pada akhirnya membuat dunia Islam tidak berdaya!

Selama 1400 tahun sejarah Umat Nabi Muhammad (s.a.w.), tidak ada orang yang berhasil ditunjuk sebagai Khalifah, dan penentuannya disahkan dengan Bai'at, atau sumpah setia umat Muslim, tanpa orang tersebut memiliki kekuasaan langsung, atau kemampuan mengendalikan Hijaz pada umumnya dan Haramain pada khususnya. Kedudukan Khilafah dan kekuasaan atas Haramain pada khususnya selalu tidak terpisahkan dalam kesadaran religius-politik umat Islam.

Hubungan tak terpisahkan tersebut juga memiliki dasar Syariah selama ibadah Haji menjadi institusi mengikat kesetaraan bagi semua anggota umat Islam, dan ibadah Haji termasuk perjalanan fisik menuju Hijaz. Maka dari itu tidak ada yang bisa diakui sebagai pemimpin tertinggi umat Muslim jika tidak memiliki kekuasaan dan fasilitas menjalankan tanggung jawab atas pengaturan dan administrasi ibadah Haji. Dan ini, tentunya, termasuk kebebasan dan keamanan jamaah haji dan, dengan demikian, mensyaratkan kekuasaan atas Hijaz. Maka dari itulah, bahkan saat ibu kota Khilafah dipindahkan dari Hijaz ke Kufa (Irak), Damaskus, Baghdad, Kairo dan bahkan Istanbul, Khalifah selalu memberikan perhatian terbesarnya untuk menjaga wewenang dan kekuasaan mereka atas Hijaz. Ini berlanjut tanpa gangguan sampai kalahnya Kekaisaran Islam Utsmaniyah pada Perang Dunia Pertama.

Kini musuh-musuh Islam memberikan perhatiannya untuk mempelajari dan memahami hubungan antara Khilafah, kekuatan Islam sebagai daya kelas dunia, dan kekuasaan atas Haramain, kemudian merencanakan strategi kejinya untuk membuat Islam tak berdaya dan membatasinya hanya sebagai keimanan dalam diri pribadi tanpa kekuasaan atas kehidupan publik. Dengan kata lain, mereka merencanakan strategi untuk mensekularkan Islam sehingga mereduksi umat Muslim ke dalam jalan hidup Eropa tidak bertuhan.

Jika peradaban Barat pada akhirnya berhasil mengalahkan dan menguasai Islam, dan menggabungkan seluruh dunia Islam ke dalam tatanan internasional sekular baru yang telah didirikan oleh Barat, strategi ini mensyaratkan agar Hijaz harus tunduk pada pengaruh Barat sehingga Khilafah bisa dilemahkan dan

pada akhirnya dihilangkan. Selama Khilafah bertahan akan selalu menjadi keperihan di mata Barat, sebuah manifestasi kekuasaan Islam atas kehidupan publik, simbol kuat Teosentris Pemerintahan Publik Islam dan *Pax Islamica*, dan sebuah titik persatuan sehingga dunia Islam selalu dapat digerakkan menjadi daya dengan kekuatan besar. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara ‘kekuatan’ dengan Khilafah dalam Islam!

Inggris, menyadari sangat pentingnya Hijaz dan Haramain bagi legitimasi dan bahkan bertahannya Khilafah Utsmaniyah, memusatkan diplomasi mereka pada Perang Dunia Pertama untuk merebut Hijaz dari kekuasaan Khalifah Utsmaniyah. Ini dicapai ketika *Syarif* Husain, *Syarif* (pemimpin daerah) Mekah yang ditunjuk Utsmaniyah, dan buyut Raja Husain pemimpin Jordan saat ini, berhasil dipengaruhi Inggris untuk memberontak melawan Khalifah Utsmaniyah dan mendirikan kekuasaannya sendiri atas Hijaz dengan bantuan Sekutu dan perlindungan Inggris.

Sebelum 1916, dan di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, Khalifah Utsmaniyah kehilangan kekuasaan atas Mekah dan Jedah, yakni Hijaz bawah. Kekuasaannya atas Madinah bisa dipertahankan selama perang dan hanya sampai tahun 1919 ketika kelompok pasukan Utsmaniyah di dalam kota Madina dipengaruhi untuk memberontak melawan pemimpin heroik mereka, Fakhri Pasha. <1>

Setelah Khalifah Utsmaniyah kehilangan kekuasaannya atas Hijaz, Khilafah yang dilumpuhkan tetap bertahan di Istanbul hanya selama beberapa tahun sebelum akhirnya hancur total. Dan ini sungguh keberhasilan yang luar biasa bagi diplomasi

Inggris. Melemahkan Khilafah mengguncang seluruh struktur Kekaisaran Islam Utsmaniyah. Ia pun akhirnya jatuh. Pada 1919 pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Jendral Allenby, menguasai Jerusalem. Penting diingat bahwa Allenby, saat memasuki Kota Suci, memproklamirkan “*perang salib kini sudah berakhir*”. Jika ada keraguan apapun mengenai bahaya ekstrim yang dilakukan diplomasi Inggris di Semenanjung Arabia, pernyataan Allenby ini seharusnya bisa meredam keraguan itu.

Apa yang dimaksudkan Allenby adalah Islam kini menjadi harimau tanpa taring. Nasibnya tetap tidak berdaya secara permanen sehingga tidak akan mampu menanggapi kekalahan Jerusalem dengan sikap seperti Salahudin Ayubi (Saladin) lakukan saat Jerusalem jatuh ke tangan Salibis.

Segolongan Arab telah berperang bersama Allenby untuk merebut Jerusalem dari kekuasaan Khalifah Utsmaniyah. Golongan Arab itu kemudian menunggu kebinasaan bangkai yang tersisa dengan kemenangan Inggris atas Istanbul. Mereka merindukan kekuasaan lokal atas Hijaz, tapi masih butuh menunggu dan melihat apakah Khalifah Utsmaniyah bisa mendapatkan kekuatannya kembali untuk berusaha mengembalikan kekuasaannya atas Hijaz. Saat, pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmaniyah dibubarkan, menjadi jelas tidak ada ancaman lagi. Dan tepat pada hari itu, klien Inggris itu memulai perlawanan mereka kepada bangkai yang tersisa dengan pengkhianatan mereka pada kekuasaan Islam Utsmaniyah.

Pada tanggal 7 Maret 1924, Syarif al-Husain terlebih dahulu menyatakan diri sebagai Khilafah. Mandat terpentingnya yaitu bahwa dia secara *de facto* menjalankan pemerintahan lokal atas Hijaz. Dia juga mengaku sebagai keturunan Bani Hasyim, yakni klan Nabi dalam suku Quraisy. Sesungguhnya hal ini dipertimbangkan dengan kuat di antara para Ulama sehingga Pemimpin Qadi di Transjordan menerima klaim dan mengakui Husain sebagai Khalifah.

Mandat lainnya, yang diragukan di antara masyarakat Muslim tapi dipertimbangkan secara kuat dalam kekuatan politik semenanjung Arab, adalah Syarif merupakan sekutu Inggris, kekuatan adi daya pada saat itu, dan telah menerima sejumlah besar dukungan finansial, diplomasi, dan militer dari Inggris dalam keberhasilannya memberontak melawan kekuasaan Utsmaniyah di Hijaz. Dengan menyatakan diri sebagai Khalifah, Syarif Husain melakukan blunder besar karena tidak meminta ijin dari Inggris untuk melakukan apa yang dia lakukan. Itulah inti dari status Negara-klien yaitu kebebasan secara efektif dibatasi. Syarif Husain telah melanggar peraturan dasar sebagai Negara-klien. Bagaimana Inggris bereaksi?

Kini diplomasi Inggris di Jazirah Arab (Semenanjung Arab) multi-dimensi namun terintegrasi. Ada, pertama-tama, tujuan untuk merebut Haramain dari Khalifah. Ini dimaksudkan untuk melemahkan legitimasinya, dan dengan demikian pengaruh dan kekuasaannya atas wilayah dunia Islam lainnya pun melemah, dan untuk memudahkan kekalahan Utsmaniyah pada Perang Dunia. Kedua, Inggris menginginkan rezim bersahabat yang menguasai Hijaz sehingga bisa lebih mudah memanipulasi politik semenanjung Arab. Akhirnya, politik semenanjung Arab

dan kekalahan Utsmaniyah secara strategis berhubungan dengan usaha Zionis membangun sebuah konsensus keji dengan Inggris dalam pembentukan Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Dan diplomasi yang terintegrasi ini pada akhirnya jelas dengan Persetujuan Sykes-Picot pada tahun 1916 dan Deklarasi Balfour pada tahun 1917.

‘Adi daya’ (saat itu) dan yang disebut ‘kaum pilihan’ terikat dalam pelukan yang berakibat penting bagi mereka dan bagi seluruh umat manusia lainnya.

Tujuan diplomasi yang terintegrasi ini adalah membongkar seluruh Pemerintahan Publik Islam untuk membuat Islam menjadi tidak berdaya menghadapi Zionis yang mencapai tujuannya. Institusi Islam sudah secara integral berhubungan dengan Pemerintahan Publik Islam, Ahl al-Dhimmah dan al-Jizyah, <2> telah dihapuskan di Kekaisaran Islam Utsmaniyah pada tahun 1855 sebagai akibat langsung tekanan dari bangsa Eropa. Tapi selama institusi Khilafah bertahan selalu mungkin bagi Pemerintahan Publik Islam tetap hidup dan pada akhirnya ditegakkan kembali. Serangan terhadap institusi Khilafah adalah, maka dari itu, sangat penting jika tujuan utama Yahudi Eropa ingin dicapai.

Juga sangat jelas bagi Inggris dan Zionis bahwa Rumah Nasional Yahudi, - Negara Yahudi Israel, tidak bisa didirikan di Palestina Muslim, dan tidak akan pernah bisa bertahan selama dunia islam memiliki seorang Khalifah yang mampu menggerakkan sumber dayanya yang besar dengan semangat religius dan mengarahkannya untuk serangan militer. Maka kekuasaan atas Hijaz, yang sangat penting dalam politik

semenanjung Arab, adalah hal yang mendapat perhatian tertinggi diplomasi Inggris.

Namun klaim Khilafah oleh keturunan Bani Hasyim, Syarif al-Husain, tidak sejalan dengan tujuan diplomasi Inggris karena selalu dimungkinkan klaim itu dapat berhasil diwujudkan. Syarif al-Husain kemudian mampu menggerakkan dunia Islam untuk kembali mendirikan Pemerintahan Publik Islam dan *Pax Islamica* di jantung tanah Islam yang kuat secara simbolis, dan memberikan ancaman pada pengaruh dan kekuasaan Inggris atas bagian besar Darul Islam. Dunia Islam yang direvitalisasi pun akan membuat kekuasaan Yahudi atas Palestina dan Jerusalem sangat tidak mungkin ditegakkan.

Maka Inggris memberikan anugerahnya kepada klien Inggris yang lain di semenanjung Arab, Abdul Aziz ibn Saud, untuk bergerak melawan Husain dan merebut kekuasaan atas Hijaz darinya. Inilah kesempurnaan seni muka dua dan kemunafikan. Satu klien digunakan untuk menyingkirkan klien lainnya.

Inggris telah menuai hasil persahabatan dengan Ibnu Saud dan persekutuan selama perang dan, seperti biasa, telah menjalankan diplomasi finansial (yakni penyuapan). Ibnu Saud menerima tiap bulan sejumlah 5.000 pounds sterling dari Departemen Keuangan Inggris sebagai imbalan atas sikap netralnya yang menguntungkan dalam pemberontakan Husain melawan Khalifah, gangguan kekuasaan keturunan Bani Hasyim atas Hijaz, dan usaha diplomasi dan militer Inggris di semenanjung Arab diarahkan melawan Negara Islam Utsmaniyah. Dia dengan kejam merasionalisasi pelanggaran besarnya ini terhadap

perintah Allah Maha Tinggi dan Nabi-Nya dengan menjelaskan penyuaipan itu sebagai Jizyah, <3> (Qur'an 5:51)

Namun diplomasi Inggris dengan Ibnu Saud diarahkan pada strategi yang lebih penting daripada sekedar netralitas penuh kebaikan pada perang dan pelengseran Syarif Husain yang bertindak gegabah. Ibnu Saud memiliki potensi lebih besar yang kini mulai dimanfaatkan, berkenaan dengan klaim Syarif Husain atas Khilafah.

Kekuatan Saudi di Najd, yang muncul kembali dengan perebutan Riyadh pada tahun 1902, adalah hasil sebuah persekutuan lama antara seorang kepala suku badui dengan pemimpin religius fanatik yang sangat berpegang teguh pada ajaran sekte Wahabi. Persekutuan itu memastikan bahwa sementara keturunan kepala suku badui akan mendapatkan kekuatan politik atas wilayah yang dikuasai persekutuan, urusan religius akan tunduk pada kekuasaan keturunan pemimpin religius. Sebagai akibatnya tidak bisa dihindari Saudi Najdi berada di bawah tekanan Wahabi untuk berusaha menguasai jantung tanah Islam (Hijaz) letak keimanan sejati menurut pandangan Wahabi.

Inggris hanya terlalu senang memberikan lampu hijau kepada Ibnu Saud untuk menggerakkan pasukannya melawan Husain empat hari setelah Bani Hasyim mengklaim dirinya sebagai Khilafah. Ibnu Saud tidak sabar bergerak melawan Husain karena, seaneh yang mungkin terlihat, baik Yahudi menguasai Jerusalem dan Wahabi menguasai Hijaz menghadapi ancaman yang serupa. Keduanya tidak bisa dicapai atau bertahan jika dunia Islam memiliki Khalifah.

Dengan mendukung Ibnu Saud, Inggris kini memastikan selama Saudi-Wahabi menguasai Hijaz, Khilafah tidak akan pernah ditegakkan kembali. Lebih jauh Inggris memperhitungkan bahwa tanpa Khilafah, Pemerintahan Publik Islam tidak bisa bertahan dan kemudian dunia Islam menjadi lemah sehingga tidak akan pernah bisa digerakkan untuk menentang pembentukan Negara Yahudi Israel. Inggris pun mengetahui bahwa Wahabi sendiri tidak akan pernah mengklaim Khilafah karena Khalifah Wahabi selalu mutlak tidak diterima mayoritas besar umat Muslim di seluruh dunia. Maka dengan menarik dukungan dari Husain dan mendukung Ibnu Saud, Inggris sebenarnya melancarkan serangan tanpa ampun terhadap institusi Khilafah dan Pemerintah Publik Islam yang teosentris.

Dalam beberapa bulan Ibnu Saud bisa menguasai Mekah, dan Husain lari ke Jedah. Pada akhirnya Inggris ikut campur untuk menariknya secara fisik dari semenanjung Arab dengan menawarinya tempat pengasingan yang nyaman di Siprus. Dan segera setelah itu, Madinah dan Jedah pun berada di bawah kekuasaan Saudi-Wahabi.

Lebih dari seabad sebelumnya, persekutuan Saudi-Wahabi telah berhasil menembus pertahanan Thaif dan Mekah kemudian terjadi pertumpahan darah dengan proporsi yang sangat mencengangkan. Wahabi, dengan semangat fanatik mereka, menganggap umat Muslim yang tinggal di Hijaz sebagai *Musyrikun* (yakni kaum yang melakukan dosa Syirik) dan, sebagai akibatnya dibolehkan membunuh mereka. Khalifah di Istanbul memiliki *Mamluke Khedive* Mesir, Muhammad Ali, untuk mengutus pasukan ke Hijaz di bawah kepemimpinan anaknya Ismail. Pasukan Saudi-Wahabi langsung diusir dari

Hijaz ke gurun pasir. Seabad kemudian sudah tidak ada Khalifah dan semua komunitas muslim yang kuat berada di bawah kekuasaan penjajah barat. Sebagai tambahan, Ibnu Saud menikmati perlindungan persahabatan dari Inggris Raya, adi daya pada saat itu. Dengan demikian tidak ada kemungkinan pengusiran pasukan Saudi-Wahabi dari Haramain dan Hijaz.

Meskipun Ibnu Saud dengan selamat menguasai Hijaz, dia masih menghadapi masalah besar pada awal kekuasaannya di Hijaz pada tahun 1924. Yaitu dia harus merancang strategi agar bisa menghindari kemungkinan jangka panjang terulangnya bencana yang dialami penguasa Saudi-Wahabi yang menguasai Hijaz sebelumnya. Tampaknya, pertama-tama dia berpikir tentang kebijakan berdamai dengan umat Muslim non-Wahabi dan menggunakan kekuasaannya atas Hijaz lebih jauh demi bersatunya Umat Islam. Maka segera setelah mendapatkan kekuasaan atas Mekah dan menerima pengakuan dari penduduknya sebagai Sultan Hijaz, dia mengumumkan proklamasi kepada seluruh dunia Islam bahwa Hijaz, dan Haramain, adalah milik seluruh dunia Islam dan dia, Ibnu Saud, memerintah Hijaz hanya menjalankan mandat kepercayaan, dan demi kepentingan seluruh dunia Islam. <4> Kemudian dia melanjutkan dengan mengundang seluruh dunia Islam agar mengutus wakilnya ke Mekah sehingga, dengan dasar *Syura* (musyawarah) dan *Ijma* (konsensus), pemerintah yang adil, efisien, dan representatif bisa didirikan di Hijaz.

Pengumuman penting ini seluruhnya konsisten dengan ketentuan Pemerintahan Publik Islam. Hijaz masih Darul Islam yang didirikan oleh Nabi. Karena belum ada tanda Negara Saudi mengklaim 'kedaulatan wilayah' atas Hijaz. Hak-hak umat

Muslim di wilayah Darul Islam secara umum diakui dan dihormati.

Tapi sayangnya perihal mengenai penyatuan dunia Islam ini dan pernyataan kuat mengenai status Hijaz tidak mewakili rancangan Saudi-Wahabi yang sebenarnya di Hijaz. Itu hanyalah ‘politik pencitraan’ dan dirancang untuk melindungi Saudi-Wahabi pada saat bangkitnya inisiatif penting dari Universitas Al-Azhar di Kairo segera setelah pembubaran Khilafah Utsmaniyah. Sesungguhnya inisiatif Al-Azhar memberikan akibat yang berbahaya bagi Ibnu Saud dan kekuasaan Saudi-Wahabi di Hijaz. Itu juga merupakan masalah bagi kemenangan Zionis dan Inggris. Al-Azhar mengusulkan sidang Kongres Khilafah Islam Internasional (*Muktamar al-Khilafah*) di Kairo yang akan, di antara hal-hal lainnya, berusaha menunjuk seorang Khalifah baru bagi dunia Islam.

Jika Wahabi benar-benar berjuang demi Islam, mereka seharusnya menerima usaha Al-Azhar ini untuk mencapai kesesuaian dengan ketentuan inti Syariah, yaitu pendirian Khilafah yang otentik. Wahabi telah lama berargumen bahwa Khilafah pasca al-Rasyidun tidak sah karena, di antara hal-hal lainnya, Khilafah tidak dibentuk dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Kini Khilafah yang tidak sah itu sudah ditiadakan dan universitas pusat pembelajaran Islam mengadakan kongres Islam internasional untuk membahas masalah Khilafah dan menunjuk Khalifah baru, Wahabi seharusnya tidak hanya menerima inisiatif ini tapi juga berpartisipasi dengan serius di Kongres tersebut untuk memastikan Khilafah yang otentik direstorasi.

Tapi Wahabi tidak memiliki ketaatan yang ikhlas kepada Islam. Perilaku mereka pada intinya merupakan religius selektif, kemanfaatan, oportunistis, dan picik. Wahabi tahu bahwa dunia Islam tidak akan pernah menerima Khalifah Wahabi dan, sebagai akibatnya, mereka mengambil manfaat dengan tidak mematuhi syarat dan ketentuan inti Pemerintahan Publik Islam. Mereka menyusun semua energinya untuk menyabotase Kongres Khilafah Kairo. Strategi mereka adalah mengadakan kongres tandingan di Mekah pada saat ibadah Haji tahun 1926. Itu dimaksudkan agar Kongres Mekah dilaksanakan sebulan setelah Kongres Kairo, membuat susah bagi para delegasi untuk menghadiri kedua Kongres sekaligus. Karena Konferensi Mekah bertepatan dengan ibadah Haji, dan karena didukung aktif oleh Inggris, maka jelas memiliki keunggulan di atas Konferensi Kairo.

Kedua, mereka secara khusus mengeluarkan masalah Khilafah dari agenda dalam Kongres Mekah. Ini jelas berusaha menyabotase Konferensi Kairo dan mengubur Khilafah, menjadi bukti yang lebih dari cukup untuk mengungkap mandat palsu Wahabi yang disebut sebagai pemenang Syariah dan Islam.

Tanggapan dunia Islam terhadap persaingan ini, yakni Kongres Khilafah Kairo Mei 1926 dan Kongres Muslim Sedunia Mekah Juni/Juli 1926, adalah topik yang layak diteliti dengan serius. Seberapa besar diplomasi Inggris terlibat dalam memastikan, misalnya, agar komunitas penting Muslim India yang mendukung Khilafah Utsmaniyah sampai mereka mendirikan Gerakan Khilafah, menjauhi Kongres Khilafah Kairo dan, malah menghadiri saingannya, Kongres Mekah dengan agenda yang

secara khusus mengeluarkan masalah Khilafah? Sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan mengenai topik ini.

Tapi yang jelas Kongres Mekah ini mencapai kemenangan taktis atas Kairo, - sebuah kemenangan yang berakibat besar bagi institusi Khilafah dan Pemerintahan Publik Islam ortodoks (yakni Darul Islam). Mereka yang mengadakan Kongres Kairo ingin memastikan penyesuaian sistem organisasi politik Islam ortodoks. Tapi mereka secara intelektual tidak mampu menerapkan konsep Pemerintahan Publik Islam (Darul Islam) dan Konsep Islam mengenai Tatanan Internasional yang bisa meyakinkan dunia Islam yang ragu.

Mereka yang mengadakan Kongres Mekah, di sisi lain karena kepentingan tetap bagi golongan mereka, tidak ingin mempertahankan keimanan pada Pemerintahan Publik Islam dengan Khilafahnya, Darul Islam dll. Malahan mereka memilih menerima sistem organisasi politik saingan yang muncul dari peradaban barat modern dan yang baru menembus kedudukan Khilafah Utsmaniyah, - yaitu sistem Negara-bangsa sekular. Dan mereka melakukannya karena hanya dengan sistem Negara-bangsa, Saudi-Wahabi bisa secara realistis mendapatkan pengakuan dan legitimasi kekuasaan mereka atas Hijaz dan dengan begitu memastikan bertahannya Negara Saudi. Mereka menyamakan rencana mereka sebenarnya dan membuat usaha rumit untuk menipu dunia Islam. Dan keberhasilan mereka dalam permainan penipuan ini ditunjukkan dalam karakter representatif Kongres Mekah.

Kemenangan taktis Kongres Mekah dalam persaingannya dengan Kongres Kairo memainkan peran penting dalam

memberi jalan bagi dunia Islam lainnya, termasuk jantung tanah Islam, pada akhirnya mengikuti Mustafa Kamal dengan model Negara Turki sekularnya. Sejarah dunia Islam sejak tahun 1924 mencatat, di satu sisi, keburukan yang terus menerus diinjeksikan ke dalam tubuh Umat Islam melalui sistem organisasi politik asing ini dan, di sisi lain, usaha-usaha ulama Islam modern yang naif, bingung, dan dangkal dalam membangun kembali Pemerintahan Publik Islam baru dengan dasar sistem Negara-bangsa.

Apa yang muncul dari usaha-usaha itu adalah tujuan ‘Islamisasi’ dan pembentukan ‘Negara Islam’ dalam sistem Negara-bangsa. Tapi keduanya adalah tujuan yang sia-sia karena itu, dan masih, tidak mungkin bagi keduanya bisa dicapai tanpa terlebih dahulu membongkar beberapa perangkat inti Negara-bangsa, - intinya yaitu untuk bertahan sebagai institusi sekular.

Dr. Muhammad Iqbal dan *Maulana* Abul Ala Maududi bekerja sama dalam *Ijtihad* (yakni penjelasan independen) untuk membangun kembali Pemerintahan Publik Islam pasca-Khilafah Islam. Usaha mereka menghasilkan konsep ‘Negara Islam’. Sayangnya usaha membentuk Negara Islam menghasilkan sistem organisasi politik Islam ortodoks umat Islam atau Pemerintah Publik Islam (yakni *Pax Islamica* dan *Darul Islam*) menjadi tidak jelas. Sebagai akibatnya pemikiran politik di dunia Islam menjadi salah arah dan kebingungan besar yang diciptakan bertahan sampai hari ini.

BAB DUA

KEJATUHAN KHILAFAH UTSMANIYAH DAN KEBANGKITAN NEGARA-BANGSA SEKULAR SAUDI-WAHABI

Perang Dunia Pertama dan Pembubaran Khilafah Utsmaniyah

Seharusnya Dunia Muslim memperhatikan perang dunia pertama lebih daripada sekedar perang antar bangsa Eropa melainkan perang yang membawa pergolakan dan perubahan di Dunia Muslim yang belum pernah terjadi dalam tiga belas abad keberadaannya.

Pertama, kekuatan Muslim terbesar dan kedudukan Khilafah kontemporer, Kekaisaran Islam Utsmaniyah, memasuki perang bersama pihak Kekuatan Tengah. Sementara keputusan ini masih diselimuti kontroversi karena, sampai pada momen terakhir, kepemimpinan Utsmaniyah belum memutuskan apakah ikut perang atau tidak, dan jika ikut, pihak mana yang akan didukung, ada dasar untuk berspekulasi tentang kemungkinan Zionis-Inggris berperan dalam urusan ini.

Pimpinan Yahudi-Zionis telah melakukan sejumlah usaha yang tidak berhasil untuk mendapat persetujuan dari Khalifah agar Yahudi bisa menguasai Jerusalem. Mereka bahkan menawarkan

untuk membeli kota suci itu. Inggris mendukung usaha-usaha Yahudi-Zionis ini.

Di antara tujuan utama militer dan politik Inggris pada perang dunia pertama yaitu penaklukan Islam sebagai salah satu kekuatan dunia, penaklukan Jerusalem, dan pembentukan tanah tempat tinggal Yahudi di Palestina yang akan terus mengganggu dan mengawasi muslim Timur Tengah demi kepentingan Barat.

Kepemimpinan Utsmaniyah sudah bisa diperkirakan berusaha menggerakkan dukungan dalam perjuangan perangnya dari seluruh dunia Muslim. Sehubungan dengan ini, pada tanggal 23 November 1914, Sheikh al-Islam Negara Islam Utsmaniyah mengeluarkan fatwa dan proklamasi menyatakan jihad dan memerintahkan semua Muslim berperang melawan Kekuatan Sekutu. Diplomasi Inggris berhasil mendorong dan memanfaatkan pejuang nasionalis Arab di Semenanjung Arab menjadi perangkat efektif untuk menyerang dan menjatuhkan kekuatan besar persaudaraan Islam universal. Maka dari itulah bangsa Arab memberontak melawan pemerintah Utsmaniyah dengan dasar tawaran bantuan Inggris untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Hanya dalam kurang dari dua tahun setelah perang dimulai Syarif al-Husain, bergaya sendiri sebagai 'Raja Arab', menyatakan bersekutu dengan Inggris dan buyut Raja Jordan Husain itu berhasil memberontak melawan kekuasaan Utsmaniyah dan menjadi Raja Hijaz, jantung tanah Islam. Dengan kehilangan kota Mekah, dan pada akhirnya Madinah, Khalifah Islam Raya menderita kehancuran yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Inggris menindaklanjuti keberhasilan mereka di Hijaz dengan menjadikan anak Husain sebagai Raja di Irak dan juga Transjordan. Dan pada tahun 1919, Jenderal Inggris Allenby dengan pasukan Arab berperang dengan loyal di pihaknya, bergerak penuh kemenangan menembus Jerusalem dan menyatakan bahwa perang salib akhirnya usai. Palestina masih menjadi wilayah Mandat Inggris (dimandatkan oleh Liga Bangsa-Bangsa) hingga Inggris menarik diri pada tahun 1948 dan Yahudi Zionis menyatakan pembentukan Negara Israel.

Kekaisaran Islam Utsmaniyah kalah telak dalam perang. Kekuatan Sekutu mengkombinasikan kecakapan militer mereka dengan senjata psikologis sehingga mencapai efek serangan yang lebih keras terhadap Islam. Inggris dan Prancis berhasil mendapatkan dukungan militer Islam (dengan cara lebih licik daripada adil) dari India, Maghribi, dan area-area lainnya, maka baik muslim Arab maupun non-Arab berjuang melawan saudara Muslim Turki mereka. Hasilnya adalah bukan hanya Kekaisaran Islam Utsmaniyah dikalahkan tapi juga dasa-dasar Islam universalnya dihancurkan.

Keluar dari abu kekalahan Utsmaniyah pada perang dunia pertama yaitu pasukan nasionalis Turki sekular, dipimpin oleh Mustafa Kamal, berperang setelah perang dengan begitu berani, cemerlang dan tekad yang kuat saat kekuatan Eropa letih berperang, dikuasai gangguan opini publik domestik mereka sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa dalam mencegah bangsa Turki menimpakan kekalahan yang memukul terhadap Yunani dan kemenangan kemerdekaan bangsa Turki. Perjanjian Lausanne, ditandatangani pada tahun 1924, memberikan

pengakuan internasional kepada wilayah yang dimenangkan pasukan Turki di medan pertempuran.

Nasionalis Turki dan Khilafah

Golongan nasionalis Turki sudah berkonflik dengan Sultan-Khalifah selama lebih dari lima puluh tahun, berjuang membatasi kekuasaannya dengan aturan konstitusi untuk menggantikan apa yang mereka anggap sebagai kediktatoran otokrasi. Golongan nasionalis Turki pada intinya sekular dalam pandangan politik mereka dan sangat terkesan dengan apa yang mereka anggap keunggulan peradaban Barat atas Khilafah Utsmaniyah dan Kekaisaran Islam.

Dengan menyadari lepasnya kota Mekah dan Madinah, dan saudara Muslim telah bertempur melawan mereka di medan perang, kini mereka merasa terbebas dari kewajiban apa pun berkaitan dengan dunia Islam. Dan mereka bergerak cepat mengubah tatanan politik mereka dari model lama Darul Islam, atau Pemerintahan Publik Islam, menjadi model Negara-bangsa sekular modern barat, Republik Turki.

Dalam perubahan itu tak terhindarkan ada, dan masih ada, beberapa bentuk pemisahan ‘gereja’ dari ‘negara’ – karena ini adalah dasar model politik barat. <5> Dewan Nasional Turki baru, beriman pada model politik baru itu, menunjuk Abdul Majid sebagai Khalifah pada tahun 1922 dengan kedudukan sebagai kepala ‘Gereja’ Islam. Khilafahnya diputus dari semua kekuasaan temporal. Ini tetap dimiliki Negara.

Hanya saja tak terhindarkan model baru ini seharusnya mematahkan pergaulan Islam Turki. Tapi ternyata tidak, dan

masih tidak mungkin dilakukan kepada Islam apa yang bangsa Eropa telah lakukan kepada Kristen setelah menjatuhkan Kekaisaran Suci Romawi. Khalifah tidak, dan tidak bisa, disamakan dengan Paus. <6> Tidak akan bisa ada penyesuaian politik sekularisme dalam sistem Islam karena Islam ortodoks tidak mengakui pembagian antara Gereja dan Negara. Sesungguhnya tidak ada hal seperti ‘Gereja’ Islam.

Itu dengan cepat terbukti bahwa model baru Negara-bangsa modern tidak bisa muncul sementara institusi Khilafah tetap ada. Ada pula muncul tanda-tanda (seperti dukungan Inggris untuk Gerakan Khilafah di India) bahwa musuh-musuh Republik Kamalis mungkin berusaha menggunakan Khilafah untuk mengguncang kestabilan Republik dan pada akhirnya melengserkan Mustafa Kamal. Golongan nasionalis Turki dengan cepat dan jelas memahami bahwa Negara-bangsa dalam pergaulan Islam harus berani mengendalikan Islam dan menempatkan kedudukan Islam di bawah Negara atau menderita nasib (menurut pandangan mereka) Islam yang mengendalikan Negara dan merestorasi Darul Islam.

Tidak mengejutkan, maka dari itu, saat Dewan Nasional Turki menerapkan, pada tanggal 3 Maret 1924, peraturan lain pembubaran Khilafah. Ayat 1 Hukum itu menyatakan:

“Khalifah diberhentikan. Kedudukan Khilafah ditiadakan, karena Khilafah pada intinya terdiri dari makna dan arti kata Pemerintah (*Hukumah*) dan Republik (*Jumhuriyah*)”. <7>

Bagian hukum ini menandai momen penentuan dalam sejarah Umat Islam. Setelah periode tiga belas abad selama institusi

Khilafah diakui hampir secara universal oleh umat Islam (yakni muslim Sunni) penting bagi agama mereka bahkan saat kedudukan Khilafah diisi dengan jalan yang bertentangan dengan prinsip Islam, namun kini dunia Islam mendapatinya pada abad keempatbelas tanpa seorang Khalifah. Sesungguhnya sangat jelas dan permanen pada perubahan ini sehingga bisa dikatakan, mungkin dimaafkan, untuk menyimpulkan bahwa dunia Islam telah memasuki periode pasca-Khilafah.

Tanggapan Universitas Al-Azhar terhadap Pembubaran Khilafah Utsmaniyah

Arti penting dari pembubaran Khilafah ditemukan dalam Ayat Satu Hukum Pembubaran yaitu Khilafah digantikan oleh Negara-bangsa sekular modern. Sebuah institusi yang dianggap bagian agama Islam digantikan, di bawah pengaruh pemikiran politik dan peradaban barat, oleh sebuah sistem politik yang berasal dari dunia barat, dan istilah (*Hukumah* dan *Jumhuriyah*) yang digunakan model ortodoks lama kini digunakan dengan makna baru agar sesuai dengan model baru. Pemikir besar seperti Dr. Muhammad Iqbal tampaknya tidak cukup memahami sifat asli perubahan yang terjadi ini. <8>

Karena Khilafah merupakan bagian agama Islam, sangat jelas pembubaran institusi ini adalah bid'ah besar-besaran dan (dari sudut pandang religius) sangat mudah dipahami sedang dilakukan dan ini butuh tanggapan religius yang tepat. Dua puluh dua hari setelah pasal hukum Dewan Nasional Turki ini diterbitkan, Rektor Universitas Al-Azhar di Kairo melakukan pertemuan dengan pimpinan ulama universitas dan negeri Mesir kemudian pernyataan berikut mengenai Khilafah dipublikasikan:

“Khilafah, yang sinonim dengan Imamah, adalah kepemimpinan umum (*ri'asah*) perihal *al-Din* dan *al-Duniya*. Fungsi dasarnya adalah mengawasi kepentingan *millah* dan pemerintahan umat.”

Pernyataan ini terletak pada ‘kepemimpinan umum’ dalam kedudukan Imam yang didefinisikan sebagai:

“ . . . wakil yang menerapkan hukum religius untuk mempertahankan keimanan, untuk menegakkan aturan dan untuk administrasi masalah duniawi sesuai syariah.

“Imam menjadi Imam berdasarkan sumpah setia (*bai'at*) dengan kekuasaan untuk ‘melepas dan mengikat’ (*ahl al-halli wal-aqd*) <9> atau dipilih oleh pendahulunya untuk meneruskan kepemimpinannya.

“Imamah bisa juga didapat dengan penaklukan yakni jika golongan lain mengalahkan Khalifah dan merebut kedudukannya, Khalifah kehilangan kedudukannya. Kadang-kadang akuisisi dengan penaklukan diterapkan selain pemberian janji setia atau dengan pilihan Khalifah sebelumnya sebagaimana kasus yang terjadi pada mayoritas Khalifah pada masa lalu.” <10>

Kembali pada keadaan konkret yang mereka hadapi, pernyataan mereka mengutuk sebagai perbuatan bid'ah yang belum pernah terjadi dalam Islam, pertama penunjukkan Abdul Majid sebagai Khalifah yang dilucuti kekuasaannya, - hal ini dilakukan oleh Dewan Nasional Turki, dan kedua pembubaran Khilafah.

Karena Bid'ah ini mutlak tidak sesuai dengan prinsip keimanan, ulama menyimpulkan Kongres Islam harus diadakan, wakil dari semua masyarakat muslim harus diundang, untuk mempertimbangkan pada pundak siapa Khilafah Islam seharusnya diletakkan.

Maka ini adalah tanggapan serius pertama dari dunia Islam berkenaan dengan pembubaran Khilafah Utsmaniyah. Namun penting untuk diperhatikan bahwa usul yang diajukan keluar dari kebiasaan politik tradisional dalam model Islam ortodoks. Seseorang bahkan mungkin menganggapnya sebagai bid'ah. Ulama Al-Azhar mengusulkan untuk menggunakan Kongres Islam, sekalipun dengan wakil dari seluruh masyarakat muslim berpartisipasi, untuk menunjuk Khalifah baru. Tidak pernah terjadi lagi sejak setengah abad pertama sejarah Islam memiliki Khalifah yang dipilih oleh rakyat. Dan tidak pernah dalam sejarah Islam dia dipilih oleh Dewan atau Kongres perwakilan dari seluruh masyarakat Islam. <11>

Usulan ini menghadapi kesulitan tersebut yaitu Komite bertanggung jawab merencanakan Kongres dengan isu besar pemilihan seorang Khalifah baru yang bersifat kurang kontroversial dan lebih bersifat praktik untuk dijadikan topik analisis keadaan dan tanggapan yang mungkin dilakukan. Makna penting terbesar adalah pertama kali sejak periode awal sejarah pemerintahan Muslim ide secara umum diusulkan oleh lembaga pendidikan prestisius Muslim bahwa masalah terpenting Umat dapat didiskusikan dan keputusan diambil oleh dewan atau kongres wakil dari seluruh rakyat Muslim.

Sangat sulit untuk menentukan apakah ini termasuk pengaruh peradaban barat, sebagaimana Toynbee mencoba meyakinkan kita. <12> Meskipun demikian, memang benar bahwa Kongres dengan *syura* dan *ijma* lebih dekat ke Islam ortodoks daripada Khilafah secara keseluruhan kecuali beberapa dekade pertama keberadaannya yang menggambarkan tentang itu.

BAB TIGA

KONFERENSI KHILAFAH, KAIRO – MEI 1926

Agenda

Kongres Khilafah, yang akhirnya diadakan di Kairo pada bulan Mei 1926, memiliki agenda membahas hal-hal berikut:

1. “Definisi Khilafah dan persyaratan yang dibutuhkan Khalifah.
2. Apakah Khilafah penting dalam Islam?
3. Bagaimana Khilafah ditegakkan?
4. Apakah mungkin pada saat ini mengangkat Khilafah yang memenuhi semua persyaratan syariah?
5. Jika jawaban dari poin keempat adalah negatif, apa yang harus dilakukan?
6. Jika Kongres memutuskan bahwa penting menunjuk seorang Khalifah, langkah apa yang seharusnya diambil untuk menerapkan keputusan ini?”

Para delegasi

Para delegasi yang menghadiri Kongres ini datang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia Belanda (sekarang Indonesia), Yaman, Hijaz (sekarang Saudi Arabia), Palestina, Irak dan Polandia. Sangat menarik perhatian tidak hadirnya delegasi dari banyak masyarakat dan negeri Islam penting, - Turki, Persia (sekarang Iran), Afganistan, Najd

(sekarang Saudi Arabia) dan masyarakat Muslim Rusia, Cina, dan India.

Turki menolak undangan dengan jawaban dingin bahwa negaranya tidak memiliki masalah Khilafah. Persia, negeri Syiah, jelas tidak tertarik dengan Kongres Khilafah Suni. Muslim Rusia, Cina dan India, sebagai minoritas yang tinggal di lingkungan musuh, menerapkan sikap yang sama. Mereka menghindari Konferensi Kairo pada bulan Mei 1926, menganggapnya hanya sekedar masalah akademik, sebuah pertemuan tanpa kekuatan riil dan tampak tidak menawari mereka bantuan dan perlindungan nyata. Tapi pada dasarnya mereka tidak hadir karena konferensi tandingan telah diatur oleh pihak yang punya kekuatan riil, ‘Abdul Aziz ibn Saud. Sebenarnya dia sendiri takut dengan kebangkitan Khilafah karena dia baru saja merebut kota suci Mekah dan Madina untuk kerajaannya.

Di antara delegasi yang hadir di Kairo, ada kepala Tarekat (sufi) Sanusi, al-Sayid Idris al-Sanusi, ditunjuk sebagai *Amir* Barka dan Tripoli. Dikabarkan ada kemungkinan kuat dia dipilih sebagai Khalifah jika Kongres memutuskan untuk memilih seseorang. <13>

Sesi-sesi Kongres

Kongres terdiri dari empat sesi pada tanggal 13, 15, 18, dan 19 Mei 1926. Pada sesi pertama, Komite Pertama dipilih “untuk memeriksa usulan-usulan dan menyajikannya di hadapan Kongres”. Komite langsung mengusulkan agar proses Kongres diadakan ‘secara rahasia’. Usulan ini ditolak pada sesi keempat

sidang paripurna dan sebagai hasilnya kita jadi memiliki, sebuah dokumen publik, seluruh Catatan harfiah Kongres ini. <14>

Komite Kedua dan Ketiga ditunjuk pada sidang sesi kedua, Komite Kedua memeriksa perihal 1, 2 dan 3 dalam Agenda Kongres mereka dan Komite Ketiga memeriksa perihal 4, 5 dan 6. Laporan Komite Kedua dan Ketiga dan diskusi serta keputusan berdasarkan laporan-laporan ini membentuk inti hasil kerja Kongres. Berikut ini adalah analisis laporan-laporan tersebut.

Komite Kedua

Dalam menentukan institusi Khilafah, Komite Kedua mengambil dasar penulis-penulis terpelajar seperti al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan lainnya. Khususnya, mereka mengambil dasar pada fakta bahwa Khalifah harus menggabungkan dalam kedudukannya kepemimpinan ‘duniawi’ juga ‘religius’. Kedua, hanya ada satu Khalifah pada satu waktu karena, di antara hal-hal lainnya, peran institusi Khilafah adalah untuk menyatukan Umat. <15>

Pertanyaan kedua yang dihadapi Komite (*Apakah Khilafah penting dalam Islam?*), bisa dikatakan setidaknya, sangat tidak masuk akal. Ini adalah institusi yang selalu penting dalam politik Muslim Suni dan yang telah lama ada bersama umat Muslim sejak kematian Nabi. Dalam seluruh sejarah Umat bukan saja hidup bersama Khilafah tapi, sebagai tambahan, belum pernah dengan serius mempertimbangkan kemungkinan adanya alternatif pilihan lain. Sebenarnya dengan memberi saran ada alternatif pengganti Khilafah, seseorang mungkin

mengekspos dirinya bertanggung jawab menurutkan perbuatan *Bid'ah*. Namun, akibat dari hasil perbuatan satu orang, Mustafa Kamal Turki, kedudukan tertinggi pendidikan di seluruh dunia Islam ini menyajikan bahan pertimbangan bagi Kongres Khilafah pertanyaan – *Apakah Khilafah penting dalam Islam?*

Namun, barangkali, ini adalah pertanyaan paling tidak penting yang harus dijawab Umat dalam seluruh sejarahnya. Karenanya, tidak terelakkan, Komite menegaskan bahwa Khilafah penting dalam Islam tapi itu tidak bisa, pada saat itu, direalisasikan. <16> Dengan kata lain, Allah memberikan kewajiban pada umat Muslim yang mereka tidak bisa, pada saat itu, laksanakan. Tapi ini bukan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan itu karena Allah, dengan sifat Maha Mengetahui, tidak mungkin memberi hamba-Nya kewajiban yang mereka tidak bisa laksanakan.

Maka baik itu Khilafah tidak penting dalam Islam atau penting tapi tidak bisa direalisasikan, di mana kasusnya gagal membangun kembali Khilafah menjadi dosa kolektif bagi orang-orang beriman yang akan dihukum.

Berkenaan dengan pertanyaan ketiga (*Bagaimana Khilafah dicapai atau ditegakkan?*) Komite menjawab sebagai berikut:

1. “Dengan pemilihan oleh Khalifah sebelumnya.
2. “Dengan pemilihan oleh kelas muslim yang berpengaruh yakni orang-orang yang harus dipatuhi seperti ulama, pemimpin, tokoh masyarakat, para ahli dan juru tulis.
3. “Dengan penaklukkan oleh seorang Muslim bahkan jika dia tidak memenuhi persyaratan lainnya.” <17>

Penyajian Laporan ini oleh Komite Kedua menuju pada debat sangat penting dan menarik antara Abdul Aziz al-Effendi, seorang Profesor Tunisia yang menjadi salah satu wakil Iraq, dengan Sheikh Muhammad al-Ahmadi al-Zawahiri, kepala delegasi Mesir, <18> mengenai penerapan prinsip teori Islam dan pentingnya ijtihad:

Thalibi Effendi:

“Tidak seorang pun bisa memperdebatkan fakta bahwa Khilafah adalah permasalahan paling penting dan paling sulit dipecahkan. Maka dari itu saya mengusulkan penangguhan Kongres sampai tahun depan sehingga kita mampu mempelajari masalah ini secara detail dalam segala aspeknya. Tidak akan cukup memeriksa masalah ini hanya dari sudut pandang teoritis. Beberapa pertimbangan harus diambil terkait dengan kebutuhan lingkungan dan tempat, (dan) pengaruh pada institusi Islam oleh kebijakan-kebijakan pemerintah asing tertentu.”

Sheikh al-Zawahiri:

“Dalam pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan teologi yang diserahkan kepada kita, kita tidak ingin mengambil jalan ijtihad dan menyusun doktrin baru. Kita membatasi diri untuk memeriksa prinsip-prinsip yang diakui doktrin-doktrin yang dikenal Islam. Mengenai penerapan prinsip-prinsip ini, terserah anda menyatakan bahwa itu di luar kompetensi anda.”

Thalibi Effendi:

“Saya tidak mengusulkan doktrin baru atau pun ijtihad. Apa yang saya cari adalah pendapat anda. Jika anda menegaskan prinsip-prinsip yang tidak mudah penerapannya pada zaman kita, bagaimana?”

Sheikh al-Zawahiri:

“Bahaya bagi Islam mengajukan pertanyaan tentang penerapan, pada satu zaman dengan zaman lainnya, pengaturan Syariah. Kami rasa penerapan prinsip-prinsip umum agama seharusnya menjadi topik tanpa pengecualian, dan kami menganggap tidak ada keadaan untuk membangun keadaan baru karena urgensi zaman yang berbeda.” <19>

Sheikh al-Zawahiri, tentu, dengan sangat sempurna dibenarkan untuk menuntut bahwa Syariah, atau hukum Islam sakral yang diturunkan Tuhan, diakui tanpa revisi penyesuaian dengan zaman dan keadaan yang berbeda. Syariah harus diterapkan dalam bentuk diturunkannya tidak peduli apakah umat muslim mendapati diri mereka kompeten atau tidak kompeten menerapkannya pada zaman apa pun. Maka, bagi Sheikh Zawahiri, restorasi Khilafah adalah sebuah kewajiban religius. Dia sangat benar!

Dan Thalibi Effendi lebih dari dibenarkan karena mengajukan pertanyaan, yang dia tidak menerima jawaban, - yaitu, jika restorasi Khilafah adalah kewajiban religius bagi umat Muslim, apa akibatnya bagi umat Muslim jika mereka gagal berusaha merestorasi Khilafah?

Kekurangan dasar dalam pendekatan Zawahiri dan Thalibi Effendi adalah kegagalan mereka memperhatikan pernyataan tegas Al-Qur'an bahwa Allah memberi setiap komunitas religius Syari'ah dan *Minhaj* (atau jalan terbuka). <20> Maka, di samping hukum sakral syari'ah tidak berubah selamanya yang Zawahiri dengan benar menuntut agar kita harus selalu mengimaninya, ada pula *Minhaj* yang fleksibel di mana manusia jenius bisa mengekspresikannya agar sesuai dengan situasi dan

keadaan yang berubah sementara tetap mempertahankan Hukum tersebut.

Masalah dasar yang Komite Kedua dan Kongres gagal mengenali dan membahas dan, sebagai hasilnya, menuntun pada kegagalan Kongres ini, adalah masalah memeriksa kembali interpretasi tradisional yang dikenal ortodoks mengenai pemerintahan publik Islam (Darul Islam) dan konsep Islam mengenai Tatanan Internasional. Institusi Khilafah tidak pernah vakum. Itu adalah bagian dari Darul Islam. Darul Islam sudah tidak ada lagi di dunia sejak 1924. Itu tidak ada bahkan di Mekah dan Madinah. Dunia Islam kembali pada tahap pra-Hijrahnya.

Solusi untuk masalah ini yaitu pembentukan beragam Jama'ah di seluruh dunia Islam, masing-masing mempunyai *Amir/Imam* sendiri, dengan setiap imam menerima Bai'at dari anggota Jama'ahnya dan dengan hati-hati mengatur urusan jama'ah, semaksimal mungkin, sesuai dengan Syari'ah. Kapan pun kemungkinan muncul bagi Saudi-Wahabi kekuasaannya di Hijaz berakhir, dan bagi umat Muslim merestorasi kemerdekaan sejati di Hijaz, maka Darul Islam bisa direstorasi. Maka akan ada seorang Amir di Darul Islam, dan setiap Amir lainnya di setiap Jama'ah di dunia harus memberikan Bai'at kepada Amir Darul Islam!

Itu adalah perintah Nabi (s.a.w.) bahwa jika ada dua orang yang mengaku Amir atas Jama'ah Muslim pada satu waktu (di Darul Islam), maka salah satu dari keduanya harus dibunuh.

Sangat penting memperhatikan ayat Al-Qur'an:

“Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Allah), dan taatilah orang-orang (yang menerapkan hukum) yang berkuasa di antara kalian.”

(Qur'an, al-Nisa, 4:59)

tidak memerintahkan 'dia' (sebagai orang tunggal) yang berkuasa. Itu malah mensyaratkan ketaatan pada 'orang-orang' yang berkuasa. Maka al-Qur'an secara eksplisit mengakui kemungkinan (sementara waktu) kepemimpinan majemuk di dalam umat selama tidak ada Darul Islam.

Pada periode awal sejarah Islam setelah kematian Nabi, Umat memberikan kekuasaan atas seluruh komunitas kepada satu orang. Ini dan masih sangat diperlukan untuk konsolidasi pemerintahan Islam. Sesungguhnya itu jauh lebih dirasa penting, dan untuk alasan yang sama, membatasi pilihan pemimpin pada suku Quraisy, suku Nabi berasal.

Kepemimpinan kesatuan berakhir hampir seabad sebelum keberagaman memanifestasikan dirinya. Maka untuk sejarah berikutnya Umat tidak pernah kembali pada kepemimpinan kesatuan. Itu berlanjut sebagai konstruksi teologis yang Umat kiranya inginkan.

Seharusnya diakui bahwa Al-Qur'an, dengan mengakui kemungkinan kepemimpinan majemuk, menjadi mungkin bagi Umat untuk merestorasi sistem kepemimpinan kesatuan atas Darul Islam melalui proses bertahap yang akan mengakui sementara waktu kepemimpinan majemuk atas beragam Jama'ah selama Darul Islam tidak ada.

Komite Kedua gagal memeriksa kemungkinan ini dan, sebagai akibatnya, Kongres sendiri berakhir dalam kegagalan. Laporan Komite Kedua mengandung cacat lainnya, - cacat yang dimiliki teori politik Islam klasik. Menurut laporan kedudukan Khalifah bisa diisi dengan 'pemilihan' oleh Khalifah sebelumnya, atau bisa direbut dengan cara penaklukan.

Tidak di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam Sunah Nabi (s.a.w.), juga tidak dalam teladan Khulafa al-Rasyidun ada dasar apa pun untuk kepercayaan bahwa kepemimpinan dalam Islam bisa didapatkan dengan penaklukan atau dengan pemilihan oleh Khalifah sebelumnya. Namun harus diingat bahwa melalui sebagian besar sejarah Islam dan bahkan dalam dunia Muslim kontemporer kita menemukan kepemimpinan hampir selalu berupa dinasti kerajaan atau melalui penaklukan (kekuasaan militer zaman modern ini membentuk bagian 'penaklukan').

Generasi-generasi penerus ulama Islam keliru memahami sifat sebenarnya dari yang diduga pemilihan Khalifah kedua, Umar, oleh Khalifah pertama, Abu Bakar (*radiullahu 'anhu*). Sesungguhnya seseorang mencurigai banyak Ulama Suni memanfaatkan kesalahan konsep ini selama berabad-abad pasca teorisasi untuk menyediakan doktrin legitimasi pada berabad-abad dinasti monarki dalam Islam. Sebenarnya Abu Bakar (r.a.) memilih Umar (r.a.), bukan karena kedudukan Khalifah memberinya hak untuk melakukannya, melainkan karena rakyat, yang memiliki hak menunjuk Khalifah baru, dengan bebas mendelegasikan hak itu kepada Abu Bakar (r.a.).

Sebenarnya Ulama luar biasa kelirunya menyatakan Syariah mengizinkan Khalifah petahana menunjuk penerusnya dan,

sebagai akibatnya, mendukung seluruh sejarah Khilafah, dan bahkan sampai hari ini, dinasti monarki seperti itu disebut Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, kerajaan Saudi di Saudi Arabia, kerajaan Hasyimiyah di Jordania, kerajaan Syarifian di Maroko dan banyak kerajaan Teluk.

Kemudian, masalah yang bahkan lebih mengaburkan, ulama menganugerahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali (semoga Allah meridai mereka semua) sebutan Khulafa al-Rasyidun (Khalifah yang diberi petunjuk dengan benar), maka menegaskan ada sesuatu yang salah dengan Khilafah Muawiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Dan, tentu, apa yang khususnya menyolok tentang Khilafah pada saat empat Khalifah pertama adalah tidak ada sedikit pun dinasti kerajaan atau perebutan kedudukan dengan penaklukan. [Kami menyadari ada beberapa yang mempertanyakan kebijaksanaan ulama menutup tirai Khilafah yang diberi petunjuk dengan benar setelah kematian Ali. Mereka menuntut Muawiyah pun termasuk. Meski demikian mereka adalah minoritas yang tidak berarti dalam jajaran ulama Islam Suni].

Keadaan sulit Ulama dalam Kongres Khilafah 1926, dan seharusnya hingga kini masih, menarik perhatian serius. Pada tahun 1924 mereka memprotes pembubaran Khilafah Utsmaniyah yang sebenarnya adalah dinasti kerajaan. Dan pada tahun 1926 mereka sama sekali tidak mampu, bahkan pada level analisis konsep, menggantikan sistem dinasti kerajaan yang tidak Islami dengan pemerintahan publik yang sesuai dengan persyaratan agama.

Ayat Al-Qur'an fundamental mengenai kepemimpinan yang dinamis dalam model Islam menyatakan bahwa umat Muslim wajib menerapkan urusan mereka dengan dasar musyawarah:

“Dan urusan-urusan mereka (diterapkan) dengan dasar musyawarah (di antara mereka sendiri).”

(Qur'an, a-Syura, 42:58)

Implikasi dasar dari ayat ini adalah menunjukkan pemimpin dan penggantinya dalam komunitas Islam (yang merupakan urusan kolektif terpenting orang-orang beriman), harus dilaksanakan melalui proses musyawarah di antara semua orang-orang beriman. Dengan mengakui hak Khalifah petahana menunjuk penerusnya atau kedudukan Khalifah didapat dengan penaklukan, Ulama <21> berada dalam konflik nyata dengan Al-Qur'an karena orang-orang beriman menolak hak (memilih Khalifah) yang diberikan kepada mereka oleh Allah Sendiri.

Sesungguhnya orang-orang beriman, selama hampir seluruh sejarah umat, menerima luka yang lebih besar. Mereka diperintahkan untuk mengesahkan (sebagai kewajiban religius dengan Bai'at) dengan risiko nyawa mereka, penunjukkan kepemimpinan yang mereka tidak punya bagian apa pun dalam pemilihannya. Karena itu sangat jelas penolakan untuk mengesahkan sebuah pemilihan dianggap sebagai perbuatan menentang dan merupakan ancaman nyata bagi Khalifah yang hanya mencari legitimasi atas kekuasaannya. <22>

Jawaban Komite Kedua terhadap pertanyaan – Bagaimana Khilafah ditegakkan? – kurang memuaskan berkenaan dengan lain hal. Metode pertama dan ketiga (pemilihan dan

penaklukkan), sebagaimana yang telah kami jelaskan, bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak mendapat dukungan dari teladan Nabi dan Khulafa al-Rasyidun. Namun bahkan berkenaan dengan metode kedua yang disebutkan, yaitu – ‘pemilihan rakyat’, Komite Kedua gagal menunjukkan proses agar ini bisa digunakan pada tahun 1926 sehingga metode ini bisa diterapkan.

Akhirnya kami sekali lagi memperhatikan pertimbangan Komite Kedua dengan jelas mengungkap bahwa Ulama Al-Azhar, yang tampaknya belum mempelajari pemikiran barat, benar-benar tidak memberi perhatian pada sifat utama sistem Negara modern yang akan diterapkan di dunia Islam yang benar-benar menarik dan memenjarakan kesadaran politik Muslim.

Komite Ketiga

Komite Ketiga jauh lebih berjalan dengan benar dan realistis dalam pertimbangannya dan dengan berani menyimpulkan dalam laporannya bahwa:

“ . . . Khilafah . . . tidak mampu direalisasikan pada saat ini dengan keadaan yang umat muslim hadapi. <23>

Alasan-alasannya karena:

“ . . . pertama belum ada lembaga orang-orang yang berkuasa secara sah berhak membuat janji setia (bai'at)”. <24>

Komite Ketiga di sini mengakui bahwa proses klasik (*Ahl al-Halli wal-'Aqd*), diperkirakan digunakan untuk menentukan pilihan rakyat, tidak lagi dapat diterapkan pada tahun 1926. Itu akan lebih jujur jika diingatkan kembali bahwa proses ini tidak

pernah, sebenarnya, dengan benar diterapkan dalam sejarah Islam. Cukup jujur mengaku bahwa:

“ . . . Khilafah, sesuai dengan Hukum Islam dengan istilah yang benar, hanya ada pada Islam awal.” <25>

Komite menyatakan bahwa Kongres telah berusaha mengumpulkan perwakilan dari seluruh rakyat Islam di Kairo dan mempertimbangkan kemungkinan memberi kepercayaan kepada mereka tugas memilih seorang Khalifah baru. Komite menunjukkan bahwa Kongres tidak mewakili seluruh dunia Islam karena banyak daerah penting komunitas Muslim tidak mengutus perwakilannya. Ada makna tersirat dalam pernyataan ini, yang seharusnya kita perhatikan, yaitu implikasi bahwa jika Kongres bisa menarik perwakilan dari seluruh rakyat Islam, maka bisa memilih seorang Khalifah. Meskipun pada faktanya pemilihan itu akan menjadi yang pertama dalam seluruh sejarah Islam.

Tapi barangkali hal paling menarik dari semua alasan yang diajukan Komite Ketiga untuk menjelaskan ketidakmungkinan merealisasikan Khilafah pada saat itu adalah fakta bahwa:

“ . . . seorang Khalifah, jika ditunjuk, tidak akan mampu memenuhi kewajiban dasarnya untuk menerapkan pemerintah yang efektif atas Darul Islam. Banyak bagian Darul Islam di bawah kekuasaan asing. Dan sedikit bagian yang bebas dan merdeka telah dikuasai oleh hasutan nasionalis yang mencegah satu kelompok dari menerima kepemimpinan pihak lain, tidak mengizinkan pihak lain ikut campur dalam urusan publiknya.” <26>

Komite dengan samar-samar menyadari fakta bahwa konsep politik Darul Islam sendiri di bawah serangan mematikan dari pemikiran politik sekular barat dan di ambang memasuki tahap dilupakan.

Apa yang bahkan lebih menarik adalah fakta bagian-bagian Dunia Muslim sedang di bawah jajahan asing diistilahkan Darul Islam. Padahal dengan di bawah jajahan kekuasaan asing mereka tidak lagi membentuk bagian dari Darul Islam (karena definisi inti Darul Islam mensyaratkan sebagai wilayah di mana kekuasaan tertinggi Allah berlaku atas orang-orang beriman). Kedua, jika seorang Khalifah tidak bisa menerapkan pemerintahan efektif atas Dunia Muslim yang bebas lainnya ini tentu bukan hal baru dalam Islam. Dan itu tidak mencegah Khilafah menjalankan fungsinya selama tiga belas abad.

Sebenarnya Komite Ketiga seharusnya menunjukkan bahwa kota Mekah dan Madina sedang di bawah kekuasaan Saudi-Wahabi dan, sebagai konsekuensinya, siapa pun Khalifah yang ditunjuk akan menderita pertanggungjawaban yang tak terhitung karena tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan pemerintahan atas *Haramain*. Pada waktu tidak ada Khalifah dan institusinya sendiri sedang di bawah serangan, bahkan lebih daripada waktu normal, wajib ada seseorang yang ditunjuk untuk menempati kedudukan memerintah *Haramain* dan administrasi Haji. Dan ini, sebenarnya, menjadi dasar usaha Syarif al-Husain mengklaim Khilafah atas dirinya.

Penguasa Saudi-Wahabi yang menjalankan kekuasaan atas *Haramain* telah memberikan pertunjukan yang cukup bahwa dia adalah kekuasaan yang harus dihadapi dan, sebagai tambahan,

dia tidak tertarik sedikitpun pada Khilafah. Di sinilah letak kesulitan dasar Kongres Khilafah.

Apa yang seharusnya Komite lakukan, dan tidak dilakukan, adalah mengambil kesimpulan adil dan sederhana bahwa tidak ada Khalifah dapat ditunjuk dan mendapatkan pengakuan dari umat Muslim selama Barat menguasai *Haramain* dan Haji. Dan Barat akan melanjutkan kendali politik itu selama Wahabi menguasai *Haramain*. Sebagai akibatnya, perintah pada akhir zaman adalah menemukan jalan dan cara membalas diplomasi Inggris di Semenanjung Arab dan mengusir pemerintah Saudi-Inggris atas *Haramain* dan mendapatkan kembali *Haramain* untuk kepentingan Umat.

Laporan Komite Ketiga memohon dengan sangat kepada Kongres agar tidak berkecil hati dengan ketidakberhasilan menyelesaikan masalah Khilafah dan menunjuk seorang Khalifah baru:

“Sudah cukup bagi Kongres untuk mengetahui bahwa Kongres ini telah membuat layanan besar bagi umat Muslim dalam mendiagnosa untuk mereka penyakit dan menunjukkan kepada mereka obatnya.”
<27>

Obat ini yaitu rekomendasi bahwa:

“. . . rakyat Islam seharusnya mengorganisasikan dengan bersama-sama di beberapa negeri Islam, Kongres selanjutnya yang akan memberi mereka kesempatan sudut pandang yang berubah secara periodik sampai mereka berhasil menyelesaikan permasalahan Khilafah bersesuaian dengan kepentingan Islam. <28>

Resolusi Kongres

Kongres dicemaskan oleh pesimisme laporan Komite Ketiga. Sesungguhnya Sheikh al-Zawahiri menjulukinya “orasi kematian Islam”. Para delegasi, yang lebih dahulu telah membuka Kongres kepada publik dan pers, kini memutuskan satu bagian laporan harus disembunyikan dari pers. <29> Sheikh Zawahiri, yang memimpin oposisi terhadap laporan Komite Ketiga, melaporkan rancangan resolusi yang diterapkan oleh Kongres. <30> Resolusi menegaskan bahwa Khilafah mampu direalisasikan. Kongres lain seharusnya diadakan sehingga seluruh rakyat Islam diwakili dengan cukup dan Kongres akan mengambil pengukuran penting untuk mendirikan Khilafah yang memenuhi persyaratan sesuai Syariah. Singkatnya, Kongres tersebut akan memilih seorang Khalifah baru.

Dengan catatan optimis ini Kongres berakhir. Komite Ketiga, terlalu dikuasai oleh Kongres, mendapati kekhawatiran mereka pada akhirnya bertahan karena usulan Kongres, yang diharapkan memilih seorang Khalifah baru, tidak pernah diadakan. Dunia Islam, sebenarnya, memasuki periode pasca-Khilafah. Dan penyebab dasarnya adalah kekuasaan Saudi-Wahabi atas *Hijaz* dan *Haramain*, dan pendirian Negara-bangsa Saudi-Wahabi Saudi Arabia sebagai Negara klien Barat tidak bertuhan.

Seiring dengan berjalannya waktu, debu menutupi inisiatif Al-Azhar dalam merespon pembubaran Khilafah Utsmaniyah jelas menunjukkan strategi permusuhan dari Inggris dan Yahudi Zionis telah menghasilkan pencapaian besar, yaitu: Islam pasca-Khilafah!

BAB EMPAT

ALTERNATIF CURANG SAUDI-WAHABI UNTUK MENGGANTIKAN KHILAFAH

Kongres Muslim Sedunia Mekah Juni-Juli 1926

Kongres Muslim Sedunia, yang diadakan di Mekah pada bulan Juli 1926, awalnya dipengaruhi oleh pembubaran Khilafah Utsmaniyah di Semenanjung Arab (Jaziratul Arab) dan, khususnya, Istana Saud yang baru saja mendirikan kekuasaannya di Arab.

Abdul Aziz ibn Saud kembali merebut Najd setelah terlebih dahulu merebut Riyadh pada tahun 1902. Tapi dengan membangun politik *raison d'etre* (alasan terpenting adanya) kekuasaan Istana Saud dengan dasar religius gerakan Wahabi, itu tak terelakkan Najd Wahabi harus merebut Hijaz, kapan pun kesempatan datang, untuk memaksa tunduknya jantung tanah Islam kepada (sudut pandang Wahabi mengenai) keimanan sejati.

Kesempatan itu datang saat Syarif al-Husain (Syarif Mekah yang ditunjuk Utsmaniyah), beraksi bersama-sama dengan strategi Pasukan Sekutu pada Perang Dunia Pertama, merebut *Hijaz* dari Utsmaniyah Turki pada tahun 1916 dan menerapkan atasnya kekuasaan Keluarga Hasyimiah Husain. Dengan melakukan itu, dia melarang Wahabi dari melaksanakan ibadah Haji. Terlepas dari konflik teologis dengan Wahabi yang dia gunakan untuk membenarkan larangan itu, dia juga sadar pada

fakta bahwa Najd Wahabi merupakan ancaman potensial terhadap kekuasaannya di Hijaz.

Baik Husain maupun Ibnu Saud bersekutu dengan Inggris selama perang dan, sebagai akibatnya, Ibnu Saud tidak bisa berusaha merebut Hijaz setelah perang berakhir. Bahkan kebijakan perang pun mendikte dia harus menunggu untuk melihat langkah apa yang diambil Khalifah di Istanbul untuk merebut kembali pemerintahan Hijaz.

Hanya ketika Khilafah dibubarkan, waktu akhirnya tiba saat dia bisa bergerak melawan Husain. Husain, tentunya, sangat menyadari hal ini, dan menjadi usaha sia-sia saja mengumpulkan dukungan dunia Muslim untuk memperkuat tangannya melawan Ibnu Saud saat dia mengaku sebagai Khalifah pada tanggal 7 Maret 1924 (empat hari setelah pembubaran Khilafah Utsmaniyah).

Tahun 1924 benar-benar menjadi tahun paling penuh kejadian penting dalam sejarah Islam. Karena Ibnu Saud menanggapi pengumuman Khilafah Husain dengan menyerang Hijaz. Pasukan Najdi Ibnu Saud menaklukkan Taif pada tanggal 5 September 1924, Mekah 3 Oktober, dan Madina 5 Desember. Satu tahun kemudian, pada tanggal 19 Desember 1925, Jeddah direbut sementara itu ‘Khalifah’ dan ‘Raja Arab’ tidak beruntung lari ke dalam pengasingan. Tidak mengejutkan orang-orang terkemuka Mekah menemukan keuntungan untuk menerima Ibnu Saud sebagai Raja Hijaz.

Jaziratul Arab, yang kini bersatu di bawah kekuasaan Saudi-Wahabi, hampir segera mulai menyatakan klaimnya atas

kepemimpinan Umat dan, dalam proses, menyediakan jalan alternatif bagi kesatuan Muslim selain Khilafah, - yaitu, jalan solidaritas 'intra-nasional' Islam di dalam sebuah sistem kedaulatan Negara-bangsa Islami.

Penguasa Saudi-Wahabi Hijaz sangat menyadari bahwa Dunia Islam tidak akan pernah menerima kepemimpinan Wahabi. Dengan demikian Khilafah Saudi-Wahabi tidak mungkin terwujud. Dengan kata lain, jika umat Muslim sedunia berkumpul bersama dan memilih seorang Khalifah maka itu akan menjadi masalah yang menakutkan dan benar-benar sangat berbahaya bagi kekuasaan Saudi-Wahabi di Hijaz. Itu akan menjadi pengalaman bencana besar terulang seperti kejadian lebih dari seabad sebelumnya saat Wahabi diusir dari Hijaz oleh pasukan yang diutus dari Mesir.

Karena ancaman yang bisa jadi bahaya dari Kongres Khilafah di Kairo Mei 1926 ini, Saudi mulai mencari institusi dan forum politik alternatif mengenai Khilafah. Mereka menemukannya dalam Sistem Negara-bangsa Islami, kerjasama dan solidaritas antar-Negara Islami Internasional. <31> Dasar-dasar tatanan baru sudah terbentuk, dan sangat nyaman bagi Saudi-Wahabi, dengan berdirinya, oleh Mustafa Kamal, Republik Turki tepat di pusat Khilafah.

Tidak masalah bagi mereka bahwa sistem Negara-bangsa, yang merupakan politik ciptaan Barat sekular baru dan yang merupakan dasar model masyarakat sekular baru, benar-benar bertentangan dengan Pemerintah Publik Islam menurut Syariah. Apa yang penting bagi mereka adalah fakta bahwa sistem Negara-bangsa Islami itu akan menempatkan kekuasaan Saudi-

Wahabi di Hijaz dalam posisi yang benar-benar tak dapat direbut. Negara Wahabi telah mengangkat penolakan terkeras terhadap Bid'ah (yakni inovasi dalam agama) kini, mereka sendiri, mengusulkan Bid'ah terbesar dalam sejarah Umat!

Oleh karena itulah, strategi Saudi-Wahabi mengorganisir Kongres tandingan Kongres Khilafah Mei 1926. Mereka menamakan Kongresnya *Muktamar al-Alam al-Islami* (Kongres Muslim Sedunia) dan mengadakannya di Mekah pada bulan Juli 1926 bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Haji. Karena alat transportasi yang tersedia pada tahun 1926, sangat sulit bagi para delegasi menghadiri kedua Konferensi sekaligus. Maka dari itu, Saudi membuat inisiatif politik yang penuh perhitungan dan kelicikan sehingga memaksa Dunia Muslim untuk memilih salah satu dari dua Konferensi.

Tujuan utama Saudi mengadakan Kongres adalah menempatkan Pemerintah Publik Islam beristirahat, dan mengantarkan sistem baru Negara-bangsa Islami. Dalam kerangka kerja Tatanan Islam 'intra-nasional' baru, Saudi Wahabi akan mendapatkan pengakuan kekuasaannya di Hijaz.

Travaux preparatoire (pembukaan) Kongres mengungkapkan pemimpin Saudi dengan licik mencitrakan dirinya di hadapan semua undangan sebagai seorang 'pemenang' Islam dan dia berjanji merestorasi Islam otentik di Jaziratul Arab.

Wahabi, seperti sudah kami perhatikan terlebih dahulu, menyadari bahwa dunia Islam akan menerima seorang Khalifah Wahabi. Tapi itu jauh sebelum Abdul Wahab mendapati dirinya dipengaruhi oleh pandangan pemikir tajam Islam, Imam Ibnu

Taimiyyah. Pendapat mereka adalah Khilafah otentik, karena tidak diangkat dengan benar, berfungsi sebagai instrumen untuk memecah-belah Umat. Dengan demikian, Khilafah tidak bisa menjadi lambang dan dasar persatuan Muslim. Peran ini harus diberikan kepada Syariah.

Maka dari itulah Najd dan Hijaz Wahabi resmi tetap menjauh dari Kongres Khilafah Kairo. Dan karena posisi strategis yang mereka duduki adalah kekuasaan yang baru saja dimenangkan di jantung tanah Islam, bisa diperkirakan kepemimpinan Saudi-Wahabi berusaha merebut kesempatan dengan pembubaran Khilafah Utsmaniyah dan kekalahan Khilafah Syarifian yang berumur pendek untuk memimpin Umat ke arah persatuan melalui pendekatan baru. <32>

Fakta mengenai waktu yang ditetapkan Ibnu Saud untuk Kongres Muslim Sedunia adalah Juni-Juli 1926 (sebulan setelah Kongres Khilafah Kairo) dengan jelas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kongres ini diorganisir sebagai alternatif Kongres Khilafah.

Ada alasan lain yang mendasari keputusan pelaksanaan Kongres Muslim Sedunia di Mekah. Ibnu Saud menginginkan pengakuan Islam internasional untuk kekuasaannya di tanah suci. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi Wahabi karena ada perbedaan religius yang signifikan antara mereka dengan dunia Islam lainnya. Tidak kecil dari perbedaan ini adalah fakta bahwa Wahabi mengikuti mazhab Islam Hambali yang adalah minoritas kecil di dunia Islam yang didominasi oleh pengikut-pengikut mazhab Hanafi, Syafii, dan Maliki. <33>

Ketika pada abad ke-18 Wahabi memenangkan kekuasaan singkat atas tanah suci, mereka melakukan, dengan semangat fanatik mereka, mandi darah besar-besaran. Ada reaksi mendadak dan kemarahan yang menyebar di dunia Islam kemudian pasukan Mesir yang diutus ke Hijaz mengalahkan mereka dan mengusir mereka menuju alam liar. Pada kesempatan kedua ini, maka dari itu, Wahabi ingin memastikan dunia Islam mengakui kekuasaan mereka di tanah suci. <34> Ini adalah tujuan utama kedua diadakannya Kongres Muslim Sedunia.

Delegasi-delegasi Kongres

Kongres Muslim Sedunia yang diadakan di Mekah pada bulan Juni 1926 sebagai hasil usaha Ibnu Saud, dielu-elukan sebagai sidang paripurna pertama dalam sejarah Islam. Ibnu Saud sendiri menyebutkan hal ini dalam sambutan pembukanya:

“Berkenaan dengan bentuk dan tujuannya, sidang anda sekalian tanpa keraguan merupakan pertama kalinya dalam sejarah Islam.” <35>

Dari awal, Kongres ini dimaksudkan menjadi organisasi permanen:

“Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga Kongres ini dapat bersidang lagi dan lagi setiap tahun (pada saat pelaksanaan ibadah Haji).” <36>

Tidak seperti Kongres Khilafah Kairo, Konferensi Mekah menarik pertemuan representatif dan perwakilan dengan kualitas tinggi. Semua komunitas penting Islam dan semua Negeri Islam merdeka (kecuali Persia) diwakili. Dari sub-benua Asia Selatan

datang perwakilan tingkat atas semua organisasi penting Islam. Contohnya, Sayid Sulaiman Nadvi mengepalai delegasi mewakili Gerakan Khilafah India. <37> Tiga anggota delegasi lainnya yaitu *Maulana* Muhammad Ali Jauhar, saudaranya, *Maulana* Shaukat Ali, dan menantunya, Syaib Quraishi. Ada delegasi yang dikepalai Sayid Muhammad Kifayatullah mewakili Asosiasi ulama India dan delegasi lain dikepalai oleh Sheikh Sanaullah mewakili Ulama *Ahl al-Hadits* India.

Dewan Mufti Palestina, Sayid Amin al-Husseini, mengepalai delegasi Palestina, Jenderal Ghulam Jilani Khan - delegasi Afghanistan, Edib Saroit - delegasi Turki, Sheikh al-Zawahiri - delegasi Mesir dan Reazuddin Fakhruddin - delegasi Muslim Rusia. Bersama Fakhruddin di tim delegasi itu ada perwakilan dari Oufa, Astrakan, Kazan, Crimea, Siberia, dan Turkistan. Delegasi pun datang dari Jawa, Suriah, Sudan, Najd, Hijaz, Yaman, dll.

Sejumlah individu secara khusus diundang ke Kongres. Dalam kelompok ini yaitu Sheikh Rasyid Rida ulama Islam Suriah terkenal yang merupakan murid Sheikh Muhammad Abdu, dan Sardar Iqbal Ali Shah, ulama Afghanistan yang tinggal di London, yang menulis rangkaian artikel mengenai Konferensi ini untuk penerbitan Inggris. <38> Ketidakhadiran penting dari Konferensi ini yaitu dari Persia, Cina, Sanusi Libya dan Maghribi lainnya.

Komposisi Konferensi Kairo dan Mekah berbeda dalam hal penting lainnya. Sementara di Kairo tidak ada delegasi yang diakui sebagai wakil resmi daerahnya dan semua delegasi ikut serta dalam kapasitas individu mereka, tidak demikian dengan

yang di Mekah. Pada konferensi Mekah ini, komunitas dan negeri Islam mengutus delegasi resmi mereka dan, dengan melakukan itu, menunjukkan lebih suka pada forum Mekah dan pendekatan baru menuju persatuan umat. Di sinilah letak penjelasan sederhana namun fundamental untuk organisasi kontemporer dunia Islam sebagai sebuah sistem Negara-bangsa, yaitu: rakyat Muslim tanpa kritik menerapkannya karena dua alasan:

- Karena keadaan suram yang menghadapi Dunia Muslim,
- Karena ulama tidak bisa secara efektif menjelaskan dasar-dasar Pemerintah Publik Islam (Darul Islam) dan Konsep Islam mengenai Tatanan Internasional yang di dalamnya Darul Islam berada.

Sang Raja dan Kongres

Kongres menerima dua pesan dari Raja Abdul Aziz ibnu Saud. Pertama, dalam sambutan pembuka Kongres, Raja menyampaikan maaf sejarah Hijaz berakhir dengan kelaliman Husain yang, di antara dosa-dosa lainnya, menempatkan Hijaz di bawah “pengaruh non-Muslim asing”. <39> Ini dilarang Nabi, maka dari itu pembenaran disajikan atas penaklukan Najd terhadap Hijaz. Sebagai hasil penaklukan itu, Sang Raja dengan senang hati menunjukkan, bahwa kini keamanan dijamin di Hijaz. Kongres diajak untuk tetap menjaga sesi-sesinya dengan suasana keamanan dan kebebasan total tersebut. Penghambat konferensi yang tersisa hanyalah batasan-batasan Hukum Islam dan “tidak ikut serta dalam politik internasional tidak pula dalam perbedaan yang memisahkan masyarakat

Muslim tertentu dari pemerintah mereka.” <40> Namun Ibnu Saud kurang jujur dalam pernyataan pembukanya karena dia sama bersalahnya dengan Husain dalam membantu dan bersekongkol sehingga pengaruh Inggris memasuki Semenanjung Arab.

Dua hal menonjol dalam sambutan sang Raja. Pertama kepemimpinan Wahabi menunjukkan muka sebaik mungkin agar mendapat dukungan Kongres, - maka ‘keamanan’ dan ‘kebebasan total’ dijanjikan. Tapi kedua, dan lebih penting, larangan topik politik internasional dalam diskusi Kongres dengan jelas berarti keamanan Negara Saudi-Wahabi dan pemeliharaan hubungan dengan sekutunya (khususnya Inggris) lebih diutamakan daripada pertimbangan pendapat Umat yang diungkap melalui *Syura* dalam sebuah Konferensi Islam ini ‘belum pernah terjadi sebelumnya’ dalam sejarah Islam.

Sang Raja memberi Kongres tugas ‘aman’ untuk ‘memeriksa jalan dan cara penting agar kota-kota suci menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam terbaik, agama paling sempurna dalam arti kesejahteraan dan kebersihan, dan negeri Muslim paling mencolok pengakuan Islamnya”. <41>

Sangat jelas dalam sambutannya, sang Raja berusaha menyisipkan dalam Kongres ide rekayasa pembagian antara ‘agama’ dan ‘politik’, dan sebuah teori baru sehingga topik dalam pembahasan Kongres Islam terbagi menjadi topik ‘agama’ dan ‘urusan-urusan religius’. Ini adalah bid’ah dengan sifat sungguh patut dicela karena sangat bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, Sunah Nabi dan dasar-dasar hukum Islam. Sang Raja sebenarnya berusaha mengubah al-Islam, yang

merupakan al-Din, menjadi ‘agama’ dalam arti sempit dan menyimpang sebagaimana istilah itu digunakan dalam peradaban barat sekular.

Pada tanggal 2 Juli 1926, pada sidang sesi ke-15, sang Raja menyampaikan pesan kedua kepada Kongres, dia berusaha mencapai salah satu tujuan-tujuan utama inisiatif Wahabi, yaitu pengakuan internasional Islami dan penerimaan kekuasaan Saudi-Wahabi atas Hijaz.

Sang Raja menguraikan secara terperinci *politique*-nya di Hijaz sebagai berikut:

1. “Kami tidak mengakui campur tangan asing di negeri sakral ini – apa pun sifatnya.
2. “Kami tidak mengakui keistimewaan terbuka bagi suatu pihak dan tertutup bagi yang lain; apa pun yang terjadi di negeri ini harus sesuai dengan Syariah.
3. “Hijaz harus menjadi rezim netral khusus yang tidak berperang tidak pula diserang; dan semua Negara Muslim merdeka harus menjamin netralitas ini.
4. “Ada kebutuhan untuk membahas bantuan finansial yang datang (ke Hijaz) dari banyak negeri Islam, cara distribusi dan (kebutuhan untuk memastikan) manfaatnya bagi tempat-tempat suci.” <42>

Apa yang sang Raja sedang berusaha lakukan dalam sambutan ini adalah tidak kurang dari mengemukakan teori politik Islam baru. Begitulah meskipun Saudi-Wahabi yakin hanya merekalah yang Muslim, dengan demikian Hijaz dan Najd yang di bawah kekuasaan mereka adalah Darul Islam sejati. Maka semua

wilayah di luar Hijaz dan Najd (atau Saudi Arabia modern) adalah 'asing'. Dan saat sang Raja berbicara mengenai kebutuhan untuk mencegah campur tangan 'asing' apapun di Hijaz, dia menyebutkan khususnya jenis campur tangan yang pernah mengusir Wahabi dari Hijaz lebih dari seabad sebelumnya. Dengan menyebutkan seluruh dunia Islam sebagai 'asing', sang Raja sangat dekat melakukan perbuatan *Kufur*.

Poin kedua yang dibuat tentunya sangat mengagumkan, yakni penerapan tanpa diskriminasi keputusan Syariah. Tapi poin kedua tidak sesuai dengan yang pertama. Dunia Islam dianggap status 'asing' yang, secara alami, tidak akan mendapatkan semua keistimewaan kaum Saudi-Wahabi. Penduduk asing, contohnya, memerlukan visa untuk memasuki Hijaz bahkan untuk melaksanakan ibadah Haji. Kaum Saudi-Wahabi tidak memerlukan visa karena mereka adalah warga negara baru lahir Saudi Arabia dan Hijaz milik mereka. Muslim non-Saudi kini bisa dipenjara jika mereka memperlama tinggal di Hijaz setelah visa mereka habis masa berlakunya, - karena mereka kini adalah warga asing dan Hijaz, yang bukan lagi Darul Islam, bukan milik mereka. Kaum Saudi Wahabi bisa tinggal di Hijaz selama mereka mau karena Hijaz kini milik mereka.

Sang Raja sebenarnya telah membongkar Darul Islam yang didirikan Nabi dengan para sahabatnya di Hijaz, merebut jantung tanah dunia Islam, menghina umat Muslim dan ditakdirkan untuk angkat kaki dari sana dengan perilaku lancang selama lebih dari enam dekade itu.

Poin ketiga dalam sambutan sang Raja sangat luar biasa. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu adalah bid'ah yang nyata.

Tidak di dalam Al-Qur'an, juga tidak di dalam Sunah Nabi, tidak pula di dalam seluruh hukum Islam ada konsep 'netralitas' Hijaz. Sesungguhnya pernyataan Hijaz tidak boleh berperang membuat jantung tanah Islam meninggalkan jihad, dan dengan demikian jelas bertentangan dengan perintah eksplisit Al-Qur'an. Di sini lagi sang Raja sedang berjalan di jalur Kufur.

Mengenai permintaan sang Raja bahwa semua Negeri Islam merdeka harus mengakui 'netralitas' rezimnya, sangat jelas ini adalah usaha yang hampir tidak bisa disembunyikan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia Islam berkenaan dengan kekuasaan Saudi-Wahabi di Hijaz.

Konferensi menanggapi sambutan sang Raja dengan cerdas menggunakan kebebasan yang ditawarkan sang Raja. Para delegasi berbicara dengan bebas dan terus terang, dengan teliti membaca Laporan konferensi mengungkapkan, tidak ada yang tampak 'diatur' oleh rezim. Sesungguhnya, pada kesempatan itu para delegasi Hijaz mendapati diri mereka memenangkan pendapat. <43>

Dengan bebas, konferensi tetap di dalam batasan yang ditetapkan kepadanya agar tidak menyinggung masalah politik internasional. Maka permasalahan Khilafah tidak pernah dibahas. Ini adalah sebuah kemenangan besar bagi pendekatan baru persatuan Muslim. Meskipun demikian, Konferensi ini memasuki isu politik dengan menyetujui sebuah resolusi <44> menuntut kembalinya Maan dan Aqaba ke dalam wilayah Hijaz karena pencaplokan Inggris di wilayah itu ke dalam Transjordan (dengan Inggris sebagai pemegang kekuasaan peralihan) melanggar apa yang Rasyid Rida klaim sebagai perintah Nabi

bahwa semenanjung Arab harus tetap bebas dari semua pengaruh non-Islam. <45>

Saat Ibnu Saud sendiri membawa politik internasional ke dalam Kongres dengan penjelasan *politique* Hijaznya, Kongres mendebat isu ini panjang lebar kemudian menunjukkan kebijaksanaan, integritas dan keimanan penuhnya pada Islam otentik dengan menolak pengakuan yang diinginkan sang Raja. Kongres ini memutuskan hanya ‘mencatat’ pernyataan sang Raja. Dan ini, barangkali, menjadi satu keputusan terpenting yang diambil lembaga perwakilan Umat selama enam puluh tahun terakhir.

Itu menjadi tamparan keras bagi Ibnu Saud dan hasilnya adalah Kongres tetap tidak aktif selama dua puluh tahun kemudian dan tidak pernah ada lagi sidang di Mekah, sebagaimana yang telah disetujui akan ada sidang tahunan saat ibadah Haji.

Pada isu panas lainnya, Kongres mengambil langkah bijaksana untuk mengalah pada keinginan tuan rumah. Ibnu Saud telah menarik perhatian Kongres, pada kedudukannya sebagai salah seorang Kepala Negara Muslim, bahwa meskipun semua Muslim bebas beribadah di Tanah Suci sesuai dengan hak-hak mereka yang dihormati secara sah oleh mazhab, pemerintah Wahabi tidak akan menoleransi perilaku apa pun yang bertentangan dengan Syari’ah. Isu ini memancing salah satu diskusi paling panas dalam Kongres ini. Sheikh al-Zawahiri menyelamatkan keadaan dengan menyajikan resolusi yang berkompromi yakni membatasi kebebasan beribadah tidak memasuki area kontroversial makam-makam para sahabat Nabi

yang sudah diperbaiki karena pernah telah dihancurkan Wahabi, dll.

Isu ini memukul hati Wahabi dan meskipun tidak dibiarkan berkembang ke tahap krisis, para delegasi menerapkan kebijakan terbesar dengan tidak menekan Ibnu Saud terlalu keras, semua delegasi India pergi dengan perasaan pahit. Ini, sebagian, menjelaskan mengapa Kongres tidak pernah melakukan sidang lagi di Mekah, seperti yang telah disetujui sebelumnya.

Sebenarnya pemimpin Muslim India, *Maulana* Shaukat Ali, yang memainkan peran pimpinan dengan mengatur Konferensi besar ketiga, pada tahun 1931, setelah dua konferensi pada tahun 1926. Dan dia tidak ragu-ragu melangkahi Mekah dengan memilih Jerusalem sebagai lokasi pertemuannya.

Beberapa hasil penting Kongres Mekah berkenaan dengan perbaikan keadaan untuk ibadah Haji, transportasi (khususnya jalur kereta Hijaz), fasilitas kesehatan, ketersediaan makanan dan minuman, perlindungan dari eksploitasi, dll. Ini adalah permasalahan yang mempengaruhi jamaah Haji setiap tahun dan pada permasalahan ini Kongres berunding panjang lebar dan menghasilkan banyak resolusi yang bermanfaat.

BAB LIMA

DUNIA ISLAM KONSERVATIF – SEBUAH USAHA TERAKHIR MEMBANGKITKAN KHILAFAH

Kongres Islam Umum Jerusalem Desember 1931

Selama lima tahun setelah dua konferensi pada tahun 1926, tidak ada usaha kolektif signifikan lainnya yang dilakukan dunia Islam untuk menanggapi kejatuhan Khilafah dan perubahan penting, menantang dan berbahaya lain yang menyapu dunia ini. Hembusan nafas terakhir Darul Islam yang sekarat terjadi di Kongres Islam Umum yang diadakan di Jerusalem pada bulan Desember 1931, dengan dasar usaha India-Palestina. <46> Itu terjadi di dalam dada harapan untuk merestorasi integritas tatanan konservatif peninggalan Nabi yang sedang runtuh. Tapi Kongres ini gagal mencapai apa-apa. Seperti Kongres Kairo dan Mekah, Kongres ini tampak masih baru lahir.

Bagi Grand Mufti Jerusalem, Haji Amin al-Hussaini, Zionisme yang tidak menyenangkan bertambah maju di Muslim Palestina antara 1926 sampai 1931 merupakan ancaman bagi Islam. Ancaman ini tidak akan terjadi jika dunia Islam bersatu. Dan itu adalah sebuah pengukuran kesederhanaan, kenaifan dan kemurnian pemikiran Islam kontemporer bahwa dia bisa berargumen konferensi Islam lain bisa diadakan di daerah jajahan Inggris, Jerusalem, menjadi cara yang tepat untuk

menghadapi ancaman tersebut. Salahuddin Ayyubi pasti berguling di alam kuburnya. Itu tampak seakan dunia ulama Islam telah kehilangan pengetahuan mengenai hubungan tegas yang dibangun Al-Qur'an antara 'kekuatan', 'kebebasan' dan 'keimanan'.

Pada Agustus 1929 ada keributan antara umat Muslim dengan Yahudi mengenai Tembok Ratapan di Jerusalem. Liga Bangsa-bangsa mengutus Komisi untuk menginvestigasi permasalahannya dan Komisi ini menemukan bahwa umat Muslim memiliki 'hak milik' atas Tembok Ratapan namun Yahudi memiliki 'hak beribadah' di hadapannya. Laporan ini tidak menyenangkan Muslim tidak pula Yahudi dan bisa dikatakan telah mengarahkan secara tidak langsung pada panggilan untuk sebuah konferensi Islam.

Awal 1931, pada acara pemakaman pemimpin Muslim India *Maulana* Muhammad Ali Jawhar di halaman Haram al-Syarif, Jerusalem<47>, persetujuan dicapai antara saudaranya, *Maulana* Shaukat Ali dan Haji Amin al-Hussaini tentang perlunya mengadakan sebuah konferensi. Beberapa bulan setelah itu, Juni 1931, laporan Komisi Tembok Ratapan dipublikasikan, dan Dewan Tertinggi Muslim Palestina kemudian mempublikasikan panggilan untuk konferensi.

Pengumuman resmi tentang persetujuan untuk mengadakan konferensi dan keputusan tanggal konferensi terjadi pada tanggal 4 September 1931 oleh *Maulana* Shaukat Ali, dalam sebuah sambutan setelah salat dhuhur di Masjid al-Aqsa, Jerusalem. Muslim India kini bisa dikatakan memiliki

kedudukan unik dan kepemimpinan yang luar biasa penting di dunia Islam.

Tanggal dan Tempat

Kongres Islam Umum diadakan di Jerusalem dari tanggal 6 sampai 16 Desember 1931. Ini bertepatan dengan 27 Rajab – 7 Sya’ban dalam kalender Islam. Kita bisa perhatikan bahwa referensi kalender Islam penting berkaitan dengan pilihan Masjid al-Aqsa sebagai tempat sesi pembukaan Kongres pada 27 Rajab. <48>

Kini sementara Kongres Khilafah bertempat di Mesir yang disebut merdeka tapi di dalam ruang lingkup pengaruh Inggris, dan Kongres Muslim Sedunia diadakan di Hijaz yang disebut merdeka tapi juga jelas di dalam ruang lingkup pengaruh Inggris, Kongres Islam Aqsa diadakan di wilayah yang secara langsung di bawah kekuasaan mandat Inggris. Jerusalem tidak punya cukup banyak ‘daun ara’ untuk menutupi statusnya sebagai daerah jajahan. Orang-orang tertentu bahkan berpendapat bahwa daerah jajahan memiliki status *Darul Harb!*

Tentunya sungguh menjadi pertunjukkan paling luar biasa, dunia Islam berkumpul dalam Kongres Islam Umum di wilayah jajahan untuk berusaha merestorasi dimensi Hukum Publik Syari’ah. Berkenaan dengan inilah Kongres Islam Umum Jerusalem unik dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Islam. Sebenarnya ini mengungkap keadaan menyedihkan sebagaimana dunia Islam telah direduksi. Pemerintah Inggris mungkin menjadi yang paling terkejut dengan perkembangan ini. Dalam pandangan Inggris, dunia

Islam akan menunjukkan ketidak-berdayaannya di hadapan publik. Pemerintah Inggris yang berbahagia hanya menahan Dewan Tertingginya dari memperingatkan Haji Amin al-Husaini bahwa Pemerintah tidak akan mengizinkan ada Kongres karena pembahasan yang mungkin diangkat akan mempengaruhi urusan internal dan eksternal kekuatan yang bersahabat. <49>

Pers Zionis, di sisi lain, bereaksi dengan keprihatinan besar mengenai panggilan Kongres, menuduh Pemerintah Inggris mengizinkan Kongres karena “dia benar-benar menginginkan konferensi itu, tidak, dia memprovokasinya untuk memuaskan Muslim Palestina dan India, juga untuk melawan Gerakan Zionis.” <50>

Seseorang juga harus mengambil pertimbangan dengan perasaan sangat kuat seperti yang disuarakan oleh banyak orang bahwa Kongres ini akan berusaha kembali mengangkat Abdul Majid sebagai Khalifah dengan kedudukan di Jerusalem. Langkah seperti itu bisa berefek negatif terhadap kestabilan rezim Angora (kini Ankara), - dan seorang Khalifah di Jerusalem, tunduk kepada kekuasaan Inggris, juga akan menjadi sesuatu yang diterima Inggris Raya dan dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan yang besar. <51>

Para Delegasi

Kongres berlangsung dalam suasana cukup bebas dari batasan-batasan, selain pengusiran warga Mesir, Abdul Rahman Azzam, berkenaan dengan kritik tajamnya terhadap kebijakan kolonial Italia di Libya, pemerintah Inggris di Palestina sama sekali tidak

mengganggu Kongres tidak pula mereka menetapkan batasan-batasan apa pun terhadap orang-orang yang hadir.

Para delegasi Kongres datang dari Persia (sebagian ulama Syi'ah), India (di antara delegasi ini adalah ulama dan pemikir besar Muslim, Dr. Muhammad Iqbal), Yugoslavia, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Suriah, dan Nigeria. Meskipun Pemerintah Mesir akhirnya memutuskan tidak mengutus delegasi resmi, ada perwakilan Mesir hadir yang mendukung sang Raja. Mereka dilawan oleh delegasi yang mewakili partai oposisi *Wafd* Mesir. Sejumlah gerakan islam di Mesir juga diwakili.

Pemerintah Irak dan Transjordan mengutus delegasi resmi. Kerajaan Saudi, Abdul Aziz ibn Saud, bimbang dalam sikapnya terhadap Kongres dan akhirnya dengan cerdas mengutus perwakilan yang tidak mampu mencapai Jerusalem tepat waktu untuk berpartisipasi dalam Kongres. Turki dan Afganistan menolak ikut serta dalam Kongres. Maka dari itu, dibandingkan dengan Kongres Mekah Juli 1926, ada penurunan tajam dalam partisipasi delegasi resmi pemerintah di Kongres Jerusalem.

Hasil Kerja Kongres

Setelah pembukaan resmi Kongres di Masjid al-Aqsa setelah salat magrib pada tanggal 6 Desember (27 Rajab), <52> delapan komite dibentuk untuk membahas dan melaporkan permasalahan berikut:

- Undang-undang Kongres
- Propaganda dan publikasi Kongres

- Pendanaan dan organisasi
- Budaya Muslim dan usulan Universitas Islam al-Aqsa
- Jalur kereta Hijaz
- Tempat Suci dan Tembok Ratapan
- Propaganda dan pedoman Islam
- Proposal yang disajikan di hadapan Kongres.

Seperti Kongres Mekah 1926, Kongres Jerusalem menerapkan Undang-undang atau Piagam Perjanjian. Undang-undang Mekah menetapkan sidang tahunan di Mekah. Undang-undang Jerusalem menetapkan sidang dua tahunan di Jerusalem. Sekretariat kecil juga dibentuk di Jerusalem (seperti juga dibentuk di Mekah). Sekretariat Jerusalem terus bekerja selama beberapa tahun tapi Kongres ini sendiri tidak pernah melakukan sidang lagi. <53>

Kongres memutuskan agar Universitas Islam didirikan di Jerusalem. Keputusan itu diambil meskipun kecemburuan besar datang dari Universitas al-Azhar yang tidak menerima pembentukan kompetitor terhadap kedudukan uniknya dalam dunia pembelajaran Islam. <54>

Tapi hal paling penting yang dibahas Kongres adalah, tanpa keraguan, ancaman Zionis di Palestina. Sikap dan pendekatan Konferensi terhadap topik panas ini sangat objektif dan berpikiran luas. Presiden Agensi Yahudi, Mr. Sokolow, diundang untuk menghadiri Kongres dengan tujuan menjelaskan sudut pandang Zionis. Undangan, yang disampaikan oleh Shaukat Ali, ditolak. Dan dalam pers Zionis, militan Zionis memperolok-olok dan menertawakan Kongres. <55>

Ada aliran Zionis lain yang telah mendirikan Universitas Hebrew lebih berdamai daripada kelompok pertama. Zionis ini berbicara dengan lebih hormat mengenai Kongres meskipun mereka pun mengkritik Inggris sama tajamnya seperti Zionis lainnya karena telah mengizinkan Kongres membahas kebijakan Inggris di Palestina. <56>

Tapi Yahudi ortodoks konservatif di Jerusalem, yang tinggal dan bekerja terpisah dari Zionis, menyambut Kongres dari awal dan mengharapkan kesuksesan Kongres. Mereka menyatakan bahwa Yahudi tidak menginginkan tempat suci dan tidak punya hak terhadapnya; tapi mereka meminta Kongres tidak menentang adat Yahudi konservatif beribadah di Tembok Ratapan. <57>

Kongres malah melakukannya! Kongres menolak laporan Komisi Tembok Ratapan Liga Bangsa-bangsa yang menegaskan ‘kepemilikan Muslim atas Tembok Ratapan namun menjunjung tinggi hak Yahudi beribadah di Tembok itu’. <58> Dengan melakukan ini, Kongres mengasingkan Yahudi ortodoks dan melemahkan tangan mereka (yakni Yahudi ortodoks) dalam perjuangan mereka melawan Yahudi Zionis. <59>

Kongres memprotes pelanggaran haknya oleh Liga Bangsa-bangsa dan mengingatkan Liga mengenai bantuan yang diberikan bangsa Arab kepada Sekutu selama Perang Dunia pertama. Kongres memperingatkan bahwa ‘kekuasaan peralihan’ bukan berarti tunduknya bangsa Arab dan perampasan hak-hak mereka. Kongres tidak menolak prinsip imigrasi Yahudi ke Palestina dan pembelian tanah dan properti. Maka secara tidak langsung Kongres mengakui hak Yahudi masuk dan tinggal di Palestina dan memiliki properti di sana.

Dalam konteks rencana Zionis mendirikan Rumah Nasional Yahudi di Palestina, Kongres merespon dengan mengusulkan pendirian Bank Pertanian yang akan memberikan dukungan finansial bagi petani lokal untuk memperkuat perlawanan terhadap usaha Zionis membeli lahan mereka.

Respon Kongres terhadap ancaman Zionis bisa dianggap moderat. Ini sangat bertentangan dengan respon nasionalis Arab. Sesungguhnya Kongres melawan tekanan nasionalis Arab untuk menerapkan sikap lebih militan. Nasionalis Arab berkumpul secara terpisah selama Kongres berlangsung dan merumuskan 'Perjanjian Arab' yang menjadi respon terhadap nasionalisme Yahudi. <60> Pihak yang satu sesungguhnya berfungsi sama namun dalam posisi yang berbeda dari pihak lain. <61>

Meskipun demikian, Kongres gagal merasa bahwa respon religius Islam seharusnya termasuk strategi aktif membangun kekuatan religius bersama dengan pihak Yahudi yang melawan Zionisme dan bersikap ramah kepada Muslim. <62> Meskipun Al-Qur'an melarang pembentukan hubungan seperti itu dengan Yahudi (dan non-Muslim lainnya) yang menempatkan Muslim dalam keadaan bergantung atau tunduk, Al-Qur'an tidak melarang aliansi atau kekuatan bersama yang bebas dari ketergantungan. <63>

Hal yang khususnya mengecewakan yaitu kegagalan Kongres, duduk tepat di sana di kota suci Jerusalem, membuat penilaian realistis mengenai keadaan sangat suram yang dihadapi dunia Islam, dan dengan berani dan kreatif merumuskan strategi jangka panjang yang koheren dan cerdas untuk merestorasi kekuatan Umat.

Di tengah diskusi Kongres yang panas dan menarik, satu suara berdiri sebagai suara negarawan yang bijaksana. Dr. Muhammad Iqbal mempunyai pandangan untuk memperingatkan bahwa bahaya terburuk yang menghadapi Islam bukan rancangan jahat Zioisme, ketamakan kekuatan imperium, dan sebagainya, namun materialisme ateis dan patriotisme wilayah. Jika ini tidak dilawan maka kehancuran dalam Islam akan terjadi. <64>

Namun, sementara benar bahwa Iqbal mempunyai pandangan mengenai bahaya besar filosofis, seperti materialisme, membayangi peradaban Islam, tampak bahwa dia masih belum mampu secara teoritis merumuskan kembali Pemerintah Publik Islam (atau Darul Islam) dan Konsep Islam mengenai Tatanan Internasional dan kemudian menjelaskannya sehingga dengan meyakinkan menunjukkan superioritasnya atas saingan model sekular yang kini menantanginya. Masalah sebenarnya yaitu Iqbal tidak tahu apa langkah-langkah yang seharusnya diambil pada tahun 1931 untuk merestorasi kekuatan Umat!

Aktivitas Pasca Kongres

Kongres memilih Komite Eksekutif <65> yang bekerja dengan rajin selama satu tahun. Cabang-cabang organisasi dibentuk di berbagai negara yang berbeda dan perwakilan dari cabang-cabang ini mengadakan sidang di Jerusalem pada Agustus 1932 membahas jalan dan cara untuk mengumpulkan dana. Pada 1933 Amin al-Hussaini dan Altabah Pasha mengadakan perjalanan ke Irak dan India untuk mengumpulkan dana. Mereka tidak berhasil juga tidak ada Universitas tidak pula ada Bank Pertanian (untuk membantu petani) yang didirikan.

Sidang kedua Kongres yang, menurut Undang-undang, seharusnya diadakan pada November 1933, tidak terjadi. Kecuali aktivitas Komite Eksekutif dalam ‘mediasi-konflik’ pada tahun 1934 <66> dan kebangkitan yang singkat pada tahun 1950-an, Kongres Umum Islam Jerusalem pun mati dengan kematian alami.

Sekretariat yang dibentuk Kongres pada tahun 1931 terus bekerja di Jerusalem hingga Perang Dunia kedua. Meskipun demikian, mereka tidak bisa bertahan dalam keadaan perang yang merugikan dan konfrontasi langsung antara Haji Amin dengan Inggris. Haji Amin lari ke Mesir pada awal perang.

Kongres Umum Islam Jerusalem 1931 gagal karena alasan yang sama dengan Kongres Khilafah dan Kongres Muslim Sedunia 1926. Mereka tidak mampu secara teoritis menjelaskan jalan keluar dari kekacauan yang dunia Islam telah jatuh di dalamnya. Mereka secara intelektual tidak mampu merespon tantangan politik sekularisme peradaban barat dengan arogan dan percaya diri mengibuli Dunia Islam yang secara intelektual stagnan melalui sistem Negara-bangsa sekular untuk menggantikan Darul Islam.

Kematian Khilafah menjadi akhir sistem organisasi politik asli Umat Islam di mana supremasi Islam diakui dalam kehidupan publik. Munculnya Negara-bangsa Saudi-Wahabi di jantung tanah Islam berarti Islam kini disekularisasi. Islam kini diasingkan menjadi urusan kehidupan pribadi. Gerakan non-politik Tabligh Jamaat dan pro-rezim Saudi Salafi kini berusaha mengisi kekosongan. Dan terjemahan Al-Qur’an Abdullah

Yusuf Ali yang ‘secara politis benar’ dipopulerkan di tengah generasi Muslim yang tidak curiga terlelap secara politik. <67>

KESIMPULAN

Kerusakan Khilafah Islam merupakan hasil konspirasi keji yang direncanakan Inggris, Yahudi Zionis. Saudi berperan sebagai kaki tangan dalam kejahatan melawan Umat Islam tersebut. Khilafah melambangkan sebuah sistem organisasi politik (yakni Darul Islam) yang mengakui supremasi Islam dalam kehidupan publik dan dalam hubungan internasional dunia Muslim.

Kemunculan Negara-bangsa sekular Turki dan Saudi Arabia di pusat Khilafah dan jantung tanah Islam, memberikan jalan bagi sekularisasi sistem organisasi politik dunia Muslim. Dan karena telah berdiri pemerintah Negara-bangsa sekular di negeri Muslim yang kini mewakili Dunia Islam, artinya Islam tidak lagi tertinggi atas kehidupan publik atau atas hubungan internasional dunia Muslim.

Lebih terus terang menyatakan hal yang sama yakni dengan mengatakan bahwa sejauh menyangkut kehidupan publik dalam dunia Muslim, Allah tidak lagi menjadi *Akbar!* Tidak ada Muslim bisa membaca baris ini tanpa merasa marah besar terhadap orang-orang yang mengkhianati Allah dan Nabi! Kualitas iman seorang Muslim dapat diukur dengan cara dia merespon keadaan menyedihkan ini.

Dunia Islam kini tanpa kekuatan. Kesimpulan kami adalah institusi Khilafah, yang membentuk bagian Darul Islam, sangat diperlukan untuk merestorasi kekuatan. Tanpa kekuatan akan ada lebih banyak Bosnia, Kashmir, Aljazair, Chechnya,

Palestina dll. Satu-satunya cara agar keadaan yang patut disesali ini bisa diubah adalah dengan merestorasi supremasi Islam dalam kehidupan publik Muslim dan dalam hubungan internasional dunia Muslim. Ini mensyaratkan restorasi Darul Islam dan Khilafah. Maka dari itu, kita butuh menjelaskan lagi ketetapan Pemerintah Publik Islam (Darul Islam) dan Konsep Islam mengenai Tatanan Internasional, dan menunjukkan superioritasnya atas saingan model sekular yang telah muncul dari peradaban barat.

Kita juga perlu mengakui, sebagaimana booklet ini menjelaskan, bahwa tidak mungkin, dan akan tetap tidak mungkin, merestorasi Khilafah selama Hijaz tetap dalam kekuasaan aliansi Saudi-Wahabi. Kekuatan tidak bisa direstorasi tanpa pembebasan Haramain dan Hajj dari kekuasaan orang-orang yang ikut serta dalam kehancuran Khilafah.

Pembebasan Haramain dan Hajj akan mungkin saat aliansi Saudi-Wahabi pecah. Ada tanda-tanda aliansi itu sedang di bawah tekanan dan bisa terpisah. Ada banyak ulama Saudi yang kini ditahan di penjara. Isu yang sepertinya akan merusak aliansi ini adalah ‘pengakuan’ Saudi terhadap Negara Yahudi Israel, - dengan demikian inilah pentingnya karya kami berjudul: ‘Agama Ibrahim dan Negara Israel’, di mana kami menganalisis, dari sudut pandang religius Islam murni, implikasi bagi Muslim yang ‘mengakui’ Negara Yahudi Israel.

SELESAI

Catatan

1. Elie Kedourie, dalam sebuah bab berjudul ‘Jatuhnya Madina – Januari 1919’ (Islam di Dunia Modern, Holt Rinehart dan Winston, NY. 1980 hal. 277-296) menyediakan deskripsi yang gamblang dan analisis cerdas mengenai pertahanan heroik Madina oleh Komandan Utsmaniyah, Fakhri Pasha, hingga Januari 1919 ketika dia dikhianati oleh sebagian pasukannya.
2. Ahl al-Zhimmah adalah kaum non-Muslim yang dilindungi diizinkan tinggal di Darul Islam. Jizyah adalah pajak yang diwajibkan Al-Qur’an kepada orang-orang yang dikalahkan dalam Jihad, dan yang ingin terus tinggal di wilayah mereka sebelumnya. Pembayaran pajak berarti melambangkan ketundukan mereka pada kekuasaan Islam di wilayah itu.
3. “Wahai kalian yang beriman (kepada Al-Qur’an), jangan mengambil Yahudi dan Kristen sebagai teman pelindung (yakni jangan memasuki hubungan persekutuan dan ketergantungan dengan Yahudi dan Kristen yang mana kalian bergantung kepada mereka untuk keselamatan kalian), Qur’an (5:51)
4. Toynbee Ed., Survey International Affairs (Survey Urusan Internasional), 1925.
5. Cf. Bey, Rustom: “Masa Depan Islamisme”, Abda ke-19 dan Setelaknya, Vol.xcxii, No 580 Juni 1925, hal. 845-854, di mana pemikir liberal berkebangsaan Turki berargumen tentang hal ini dalam artikel dengan alasan kuat.
6. Untuk pembahasan menarik tentang topik ini lihat Toynbee, Ed. Survey Urusan Internasional, 1925, Vol 1 hal. 51-68, khususnya hal. 55. Lihat juga bab kesimpulan Sylvia Haim

- dalam Arnold, T. *The Caliphate (Khilafah)*. Edisi Revisi, Oxford Univ. Press, 1965 hal. 205-244.
7. Naskah Resmi Turki dalam Qawanin Majmuasi 1924/1340, No 431, Ankara. Press the Grand National Assembly (Dewan Besar Nasional Turki). Terjemahan Inggris dalam *Survey*, Op cit, Appendix 11 (3) hal 575.
 8. “Menurut Hukum Suni, penunjukkan seorang Imam atau Khalifah mutlak sangat diperlukan . . . ijtihad Turki adalah sesuai dengan semangat Islam Khilafah atau Imamah bisa tetap menjadi kepentingan pribadi seseorang, atau sebuah Dewan pemilihan (yakni Dewan Besar Nasional Turki atau Parlemen). Secara pribadi saya meyakini pandangan Turki masuk akal dengan sempurna.” Iqbal, M. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam). Oxford University Press. London. 1934 Bab vi “Prinsip Gerakan dalam Struktur Islam”, hal. 149
 9. Kelompok ini diharapkan mengangkat pemilihan sebenarnya dalam model klasik Islam. Meskipun demikian, melalui sejarah Islam, hampir selalu tetap itu hanya konstruksi teoritis dan tidak memainkan peran apa pun dalam proses pembuatan keputusan tertinggi.
 10. Deklarasi ini sangat signifikan dalam konteks usaha terkini untuk membangun kembali Pemerintah Islam otentik. Hal ini menggambarkan kerusakan yang mencolok dalam pemahaman sistem kepemimpinan Islam oleh pusat tertinggi pembelajaran Islam tersebut. Teks penuh *Survey*, Op. cit., Lampiran 111, hal. 576-578.
 11. Begitu baru, sungguh, adalah usulan yang dilaporkan Kepala Qadi Transjordan sebagai sebuah inovasi yang

bertentangan dengan praktik religius ortodoks. Survey, Op. cit., hal. 84.

12. Ketika Dewan Besar Nasional Angora (Ankara) membubarkan Khilafah Utsmaniyah dan ketika Wahabi mengusir dinasti Hasyimiah keluar dari Hijaz, gerak hati umum dalam Islam adalah menghadapi keadaan tersebut dengan metode Barat modern mengadakan konferensi internasional dan bukan dengan metode Islam tradisional mendakwahkan Perang Suci.” Survey, Op. cit., h 24.
13. Sylvia Haim mengklaim ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Kongres direncanakan dan didukung Raja Fuad yang secara rahasia berharap mendapatkan kedudukan Khalifah untuk dirinya. Tapi ini tidak dapat dijalankan dengan mudah karena oposisi di dalam dan di luar Mesir. Cf Arnold, Op. cit. hal 241-242.
Sementara ini mungkin benar, sikap publik Fuad tidak tertarik dengan Khilafah. Sa’ad Zaghlul, Perdana Menteriya, menjaga sikap netralitas mengenai hal ini.
14. Catatan konferensi diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan dipublikasikan oleh A. Sekaly d Revue du Monde Musulman, Vol 1 xiv, Paris, 1926.
Teks inilah yang digunakan penulis.
15. Sebagai tambahan menunjukkan bahwa Khalifah diperlukan untuk “eksekusi pengadilan, menerapkan hukuman legal, menutup pelabuhan, mangangkat pasukan bersenjata dll.” Komite menganggap itu dengan cukup penting mengutip dua Hadits (perkataan Nabi) sehingga:
“Barang siapa mati tanpa pernah mengetahui Khalifah dalam masa hidupnya mati dalam kematian pagan; dan
“Barang siapa mati tanpa pernah mengambil bai’at (sumpah

- setia kepada Khalifah atau Amir) mati dalam kematian pagan.” Revue, Op. cit., hal 74-76
16. Ibid. hal 75-76. Dengan melakukan ini, Komite mengabaikan pandangan Mu'taziliat yang menganggap Khilafah sebagai urusan kemanfaatan, dan Khawarij yang menerapkan pendapat tidak ada kebutuhan terhadap Khilafah. Komite juga memilih mengabaikan pandangan yang diungkapkan oleh Sheikh Ali 'Abd al-Raziq, lulusan Al-Azhar, yang berargumen, dalam karya tulis yang dipublikasikan di Mesir, bahwa Khilafah tidak penting dalam Islam. Pandangannya menciptakan kegemparan di Mesir.
 17. Revue, Op. cit., hal 76-77
 18. Dia menjadi Rektor Al-Azhar pada tahun 1929
 19. Revue, Op. cit., hal 77-78
 20. (Qur'an 5: 48)
 21. Referensinya diambil dari penulis-penulis seperti al-Mawardi (*al-Ahkam al-Sultaniyah*), al-Ghazzali (*Ihya ulum al-Din*). Untuk penjelasan detail pandangan ulama ini lihat Arnold, T. Op. cit.
 22. Khalifah kelima, Muawiyah, menunjuk anaknya, Yazid, sebagai penerusnya dan diteruskan olehnya. Cucu Nabi, Husain, menantang legitimasi Khilafah Yazid dan menebus penantangan ini dengan nyawanya. Tidak banyak umat Muslim peduli untuk mengikuti teladan Husain selama abad-abad berikutnya.
 23. Revue, Op. cit. hal 103
 24. Ibid. hal 108. Naskah laporan Komite Ketiga ditemukan di Survey, Op. cit. Lampiran 4, hal 578-581
 25. Ibid. hal 106

26. Revue, Op cit, hal 106
27. Revue, Op cit, hal 106
28. Ibid. hal 107
29. Paragraf ini dapat ditemukan di Revue, Op. cit., hal 108, “*De ce qui procede . . .*”, dan di Survey, Op. cit., hal 580, “Maka berdasarkan penjelasan di atas . . .”
30. Naskah Resolusi dalam Revue, Op. cit., hal 118; Survey, Op. cit, hal 89-90
31. Cf. Faruki, Kamal: “*Approaches to Muslim Unity* (Mendekati Persatuan Muslim)”. Pakistan Horizon. Vol xxv, No 2, hal 3-12 di mana dia menjelaskan alternatif ini sebagai pengganti Khilafah, atau Pan-Islamisme, sebagai universalisme Islami – yang berdasarkan kesatuan keyakinan dan praktik Muslim yang sama. Meskipun demikian, Faruqi mengabaikan fakta yang sangat transparan bahwa Khilafah didirikan dan dibuat legitimasinya dari keyakinan dan praktik umat Muslim.
32. Faruki, Op. cit., hal 3-12
33. Suni mengakui keempat mazhab sah setara.
34. Hingga Revolusi Islam Iran, Saudi-Wahabi berhasil mendapatkan pengakuan dari seluruh pemerintah Negara-bangsa Islam. Meskipun demikian, di tengah masyarakat Muslim luas kebencian besar masih ada.
35. Revue, Op. cit. hal 128
36. Ibid
37. Menjadi paradoks ternyata Gerakan Khilafah India malah memboikot Kongres Khilafah Kairo pada bulan Mei dan menghadiri Kongres Muslim Sedunia Mekah pada bulan Juni di mana permasalahan khilafah secara spesifik dikeluarkan dari agenda.

38. Artikel-artikel itu akan menjadi bacaan yang sangat menarik jika dipublikasikan sekarang.
39. Menyebutkan hubungan Husain dengan Inggris
40. *Revue*, Op. cit. hal 128-131
41. *Revue*, Op. cit. hal 128-131
42. *Revue*, Op. cit.
43. Contohnya, konferensi menyetujui proyek pembangunan dua jalur rel kereta api dari Jeddah ke Mekah dan dari Yanbu ke Madina meskipun perlawanan kuat dari perwakilan Hijaz “yang memiliki penolakan religius terhadap pembangunan jalur kereta api di sebuah negeri yang hidupnya bergantung pada transportasi unta.”
Revue, Op. cit. hal 193. Betapa seseorang berharap ulama Saudi bisa menjelaskan penolakan mereka terhadap jalur kereta api dalam konteks karena itu merupakan alternatif yang akan menghapuskan alat transportasi yang Allah ciptakan.
Pemerintah Saudi kemudian menjadi sadar akan bahaya dari teknologi modern dan membuat kebijakan menjaga transportasi alami berdampingan dengan transport mesin.
44. Naskah resolusi dalam *Revue*, Op. cit. hal 207-208. Mesir, Turki dan Afganistan abstain dalam voting.
45. Menurut Toynbee:
“ . . . salah satu efek perang 1914-1918 adalah menghilangkan keberadaan warga Turki dari Arabia dan memperluas ruang lingkup pengaruh Inggris ke seluruh semenanjung Arabia (*Survey*, Op. cit. hal 272)
Tapi sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam pencapaian unik dan penting Inggris ini saat perintah Nabi dikompromikan untuk pertama kalinya setelah bertahan

selama tiga belas abad, Inggris dibantu dan bersekongkol dengan Husain dan Ibnu Saud. Bahkan keduanya mendapat bayaran atas pelayanan mereka kepada Inggris. Pasukan Arab Husain sebenarnya bertempur bersama Inggris melawan Turki. Netralitas Ibnu Saud dalam pertempuran ini menguatkan kesempatan keberhasilan Inggris. Sampai tahun 1920 saat penerimaan bulannya dari Inggris dihentikan, Husain telah menerima sekitar enam juta pound sterling. Ibnu Saud, yang menerima dari sumber yang sama Pemerintah Inggris dengan jumlah lebih rendah sebesar 350.000 pounds dengan tarif 5.000 pounds per bulan, dengan keji menjelaskannya sebagai jizyah (pajak yang dibayarkan warga non-Muslim yang tinggal di wilayah Darul Islam)”. Survey, Op. cit. hal 273.

Adalah Inggris (pemegang kekuasaan peralihan di Transjordan) yang menambahkan Maan dan Aqaba ke Transjordan pada tahun 1925. Meskipun mantan Raja Husain memprotes penambahan ini dari tempat pengasingannya di Siprus dan Ibn Saud mendorong Kongres Muslim Sedunia untuk memegang resolusi memprotes penambahan itu, aksi Inggris tersebut dengan jelas merupakan ketentuan yang harus diterima.

Menarik untuk memperhatikan bahwa jika perintah Nabi (s.a.w.) tidak dikompromikan oleh Husain dan Ibnu Saud dalam bantuan sesat mereka kepada Inggris dan dalam usaha merebut semenanjung Arab dari pengaruh Utsmaniyah, maka tidak akan mungkin Deklarasi Balfour terjadi dan Negara Zionis didirikan di Palestina Muslim. Juga menarik untuk memperhatikan bahwa jika Aqaba tetap di bawah kekuasaan Hijaz, Saudi Arabia akan menjadi

Negara garis depan dalam konflik Timur Tengah saat ini. Semoga suatu hari sejarah mengungkap bahwa salah satu alasan Inggris menambahkan Ma'an dan Aqaba adalah untuk menciptakan zona penahan antara jantung tanah Islam yang mudah memanas dengan rumah nasional Yahudi di Palestina di mana Deklarasi Balfour diumumkan. Seharusnya jelas bahwa konfrontasi langsung antara Hijaz (kini bagian dari Saudi Arabia) dengan Rumah Nasional Yahudi di Palestina (kini Negara Israel) akan membangkitkan semangat juang Islami yang tak terkendali, sebuah faktor yang masih menjadi satu-satunya ancaman serius bagi bertahannya Negara Zionis.

46. Adalah keliru menyatakan (sebagaimana Kongres Muslim Sedunia Karachi kini menyatakan) bahwa konferensi Islami yang diadakan Jerusalem pada tahun 1931 adalah sesi kedua Kongres Muslim Sedunia (pertama diadakan di Mekah pada tahun 1926). Pertama, Kongres Jerusalem memilih menamakan diri berbeda dari 'Kongres Muslim Sedunia'. Ayat Satu dalam Undang-undang Kongres menamakannya 'Kongres Islam Umum' (*al-Muktamar al-Islami al-'Am*). Kedua, Kongres menerapkan Undang-undang sendiri – berbeda dari Undang-undang Kongres Muslim Sedunia.
47. Muhammad Ali Jauhar meninggal di London di mana dia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar mewakili India. Warga Palestina memindahkan jasadnya untuk dimakamkan di *haram al-syarif* sebagian karena pengakuan kebesarannya dan sebagian untuk mendapatkan dukungan India yang lebih besar dalam perjuangan melawan Zionisme dan kekuasaan 'peralihan' Inggris.

48. Ada hubungan penting antara 27 Rajab, Masjid al-Aqsa dan Tembok Ratapan, sebuah hubungan yang menggerakkan emosi sangat kuat di dunia Islam. Penjelarasannya adalah sebagai berikut: Bab tujuh belas Al-Qur'an, berjudul 'Bani Israel' (di Indonesia diberi judul 'Al-Isra') dimulai dengan sebuah ayat yang menyebutkan mukjizat perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjid al-Haram (masjid sakral, Mekah) ke Masjid al-Aqsa (masjid yang jauh, Jerusalem) yang daerah sekitarnya, menurut ayat ini, diberkahi Allah yang membawanya dalam perjalanan agar Dia bisa menunjukkan kepadanya beberapa 'Tanda-tanda'-Nya. Literatur Hadits menyatakan bahwa saat tiba di al-Aqsa, dia (s.a.w.) memimpin salat berjamaah yang diikuti oleh semua Nabi. Setelah itu dia diantar ke langit dan diberi kehormatan dengan sebuah pengalaman masuk ke dalam kehadiran khusus Allah. Tembok Ratapan atau Tembok Barat membentuk sebagian haram al-Syarif yang menjadi letak Masjid al-Aqsa juga tempat di mana perjalanan langit Nabi dimulai. Pada umumnya perjalanan ini dipercayai terjadi pada tanggal 27 Rajab. (*Misykat al-Masabih*), terjemahan Inggris oleh James Robson, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1975, vol. 2, Bab 23, Kitab 26 hal. 1264-1270.
49. Gibb, H. A. R., "Konferensi Islam di Jerusalem Desember 1931." Survey Urusan Internasional (*Survey of International Affairs*), London, Oxford University Press, 1935. hal 103.
50. Nielsen, A. "Konferensi Islam di Jerusalem." Dunia Muslim, Oktober, vol 22 hal 348.
51. Raja Fuad Mesir, secara khusus, sangat gelisah dengan rumor masalah Khilafah akan dibahas dan seorang Khalifah

menyatakan Grand Mufti harus mengunjungi Kairo secara pribadi dan memberikan jaminan verbal dan tertulis bahwa masalah Khilafah tidak akan dibahas. Bagi Maulana Shaukat Ali, di sisi lain, tidak ada masalah Khilafah karena dia terus mengakui Abdul Majid sebagai Khalifah. (Arnold, T. Op. cit. hal 241-244).

52. Dalam sistem Islam hari dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbenam lagi. Maka 27 Rajab (atau *Lailatul Miraj*) tidak dimulai sampai matahari terbenam pada tanggal 6 Desember.
53. Gibb, H.A.R., Op. cit. hal 105. Kongres Jerusalem dibangkitkan kembali pada tahun 1953 dan tiga konferensi diadakan pada tahun 1953, 1956 dan 1960. Mereka tidak pernah bersidang lagi sejak 1960. Ini sebagian karena Presiden Kongres Jerusalem, Haji Amin al-Husseini, juga menjadi Presiden Kongres Muslim Sedunia yang dibangkitkan lagi. Dia lebih suka bekerja dengan organisasi kedua yang mendapatkan dukungan politik Pemerintah Pakistan dan dukungan finansial Pemerintah Saudi.
54. Gibb, Op. cit., hal 102.
55. Nielsen, Op. cit. hal 353
56. Ibid.
57. Nielsen, Op. cit. hal 353
58. Naskah lengkap laporan dilampirkan Pemerintah (Tembok Barat atau Ratapan) Palestina dalam Dewan 1931 sebagai Jadwal 1 dan 2. Lihat Undang-undang Peraturan dan Pemerintah 1931. H M Stationery Office, London. 1932. Hal 462-466
59. Sikap ini lebih jauh secara kongkret dijalankan selama periode 1948-1967 ketika Jerusalem Timur di bawah

kekuasaan Yordania. Yahudi dilarang beribadah di Tembok Ratapan.

60. “Tanah Arab adalah keseluruhan yang lengkap dan tidak terbagi, dan pemecahan wilayah mereka tidak disetujui juga tidak diakui oleh bangsa Arab . . .” Gibb, Op. cit. hal 107 fn.
61. Cf. Marmorstein, Emile: “Perlawanan Religius terhadap Nasionalisme di Timur Tengah” (*Religious Opposition to Nationalism in the Middle East*) Urusan Internasional (*International Affairs*), Juli 1952, hal 344-357.
62. Di antara Yahudi ortodoks yaitu akademisi, Prof. Jacob de Haan. Dia dibunuh oleh Zionis karena pengutukan kerasnya terhadap Zionisme. Dalam sebuah wawancara penting pada awal dua puluhan dia menjelaskan sudut pandangnya sebagai berikut:
“Apakah anda berpikir sejarah hanya serangkaian peristiwa? Saya tidak. . . . Zionis mengalami kebutaan spiritual yang sama yang menjadi penyebab kejatuhan kami. Dua ribu tahun pengasingan Yahudi dan ketidak-bahagiaaan tidak mengajari mereka apa-apa. Mereka mencoba mengelaknya dengan membangun ‘Rumah Nasional’ atas dasar yang disediakan oleh kekuatan politik Barat. Dan dalam proses pembangunan ‘Rumah Nasional’ itu, mereka melakukan kejahatan dengan merebut rumah warga lain.” Asad, Muhammad, Menuju Mekah (*Road to Mecca*) hal. 98-99.
63. “Wahai orang-orang beriman, jangan ambil Yahudi dan Kristen sebagai teman pelindung kalian (yakni jangan berpaling kepada mereka untuk persekutuan keamanan, dan jangan menjalin hubungan kebergantungan dan ketundukan dengan mereka.” Qur’an (5:51)

64. Timur Dekat dan India. 24 Desember 1931. hal 687
65. Shaukat Ali merasa tidak senang dengan komposisi Komite dan menolak bekerja bersama mereka. Haji Amin telah menggunakan pengaruh mayoritasnya untuk mengeluarkan lawan-lawannya yang di antaranya adalah orang-orang yang berkompeten.
66. Komite Eksekutif berhasil memediasi perang tujuh minggu antara Saudi Arabia dengan Yaman. Sebuah perjanjian damai pada akhirnya ditandatangani untuk mengakhiri perang.
67. Abdullah Yusuf Ali adalah seseorang yang benar-benar jenius dalam karya tulis. Terjemahan Al-Qur'annya adalah pencapaian karya tulis yang luar biasa besar. Tapi dia agak naif dalam pemahamannya mengenai petunjuk politik dan ekonomi dalam Al-Qur'an. Loyalitas tertinggi dan teguhnya pada Pemerintah Inggris mengarahkannya pada pola pikir yang membuatnya tidak mampu menggenggam fakta dasar bahwa Allah telah menurunkan Agama Islam untuk menjadi yang tertinggi dalam kehidupan pribadi dan publik. Dia juga gagal mengenali bunga bank sebagai Riba. Lihat karya MA. Syarif biografi Abdullah Yusuf Ali yang berjudul : 'Mencari Pelipur Lara' (*Searching for Solace*). Islamic Book Trust. Kuala Lumpur. 1999. {Islamic Book Trust, 3 Lorang 1A/71G, Jalan Carey, 46000 Petaling Jaya, Malaysia}.

Tentang Penulis

Imran N. Hosein berasal dari Trinidad, West Indies. Dia mempelajari Islam di bawah bimbingan ulama Islam dan Sufi Sheikh, Maulana Dr. Muhammad Fadlur Rahman Ansari, di *Aleemiyah Institute of Islamic Studies*, Karachi, dan juga menjalani satu tahun akademik di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dia menjalani studi pasca-sarjana bidang Filosofi di Universitas Karachi dan Hubungan Internasional di *University of the West Indies* dan Institute Pasca Sarjana Studi Internasional, Jenewa.

Mantan Pegawai Layanan Luar Negeri di Layanan Luar Negeri Trinidad dan Tobago, dia mengundurkan diri pada 1985 untuk mencurahkan kehidupannya demi menegakkan Islam, menjabat sebagai Rektor *Aleemiyah Institute of Islamic Studies* hingga tahun 1988 ketika dia memulai tur ceramah Islamnya ke Asia Tenggara, Amerika Utara dan Selatan dan Kepulauan Karibia. Sejak 1991 dia mengabdikan diri demi Islam di New York saat masih di Masjid Darul Qur'an, Long Island.

Sebagai seorang penulis dalam bidang Perbandingan Agama, dia telah menghasilkan karya yang berjudul 'Islam dan Budha', diterbitkan di Pakistan pada tahun 1972. Karyanya dalam bidang Islam dan Hubungan Internasional termasuk 'Diplomasi dalam Islam – Sebuah Analisis Perjanjian Hudaibiyah', 'Perang dan Damai dalam Islam', 'Islam dan Tatanan Dunia Baru', 'Nabi Islam di Jerusalem – Kepentingan Strategis Isra dan Miraj', dll. Koleksi karya tulisnya yang membahas topik-topik tersebut yaitu 'Mimpi dalam Islam', 'Dari Mekah ke Madina Sekali Lagi', 'Pasukan Barat di Arabia – Sebuah Pandangan Islam' dll.,

juga dipublikasikan di Singapura pada tahun 1991 dengan judul 'Islam dan Perubahan Tatanan Dunia'.

Seri terkini karya tulisnya dalam Seri Memorial Ansari terdiri dari tiga judul berikut: Agama Ibrahim dan Negara Israel – Sebuah Pandangan Berdasarkan Al-Qur'an; Khilafah, Hijaz dan Negara-Bangsa Saudi-Wahabi; Pentingnya Larangan Riba dalam Islam.

Penerjemah: Ikhya Ulumuddien

Email: ikhyapollo@yahoo.com

Proses penerjemahan buku ini didukung Ustad Hasan Anshori, Jakarta. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Rabiul Akhir 1437 / Januari 2016